

2023 - 2026

RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	1
DAFTAR GAMBAR .....	2
DAFTAR TABEL .....	3
KATA PENGANTAR.....	4
BAB 1 Pendahuluan .....	5
1.1 Latar Belakang .....	5
1.2 Landasan Hukum .....	8
1.3 Maksud dan Tujuan.....	9
1.4 Sistematika Penulisan .....	9
BAB 2 Gambaran Pelayanan.....	11
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	11
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah .....	25
2.2.1 Sumber Daya Manusia.....	25
2.2.2 Aset/Modal .....	25
2.3 Kinerja Pelayanan .....	29
2.3.1 Capaian Indikator Kinerja .....	29
2.3.2 Realisasi Anggaran.....	48
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan .....	49
BAB 3 Permasalahan dan Isu-Isu Strategis.....	53
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.....	53
3.2 Telaahan RPJMN Tahun 2020-2024 .....	54
3.3 Telaahan RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005-2025 .....	55
3.4 Telaahan Renstra K/L .....	56
3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah .....	57
3.6 Telaahan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) Indonesia.....	59
3.7 Penentuan Isu-isu Strategis .....	61
BAB 4 Tujuan dan Sasaran.....	63
BAB 5 Strategi dan Arah Kebijakan .....	68
BAB 6 Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan.....	69
BAB 7 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan .....	90
BAB 8 Penutup.....	91



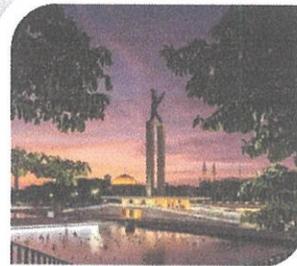
---

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Timeline dan Tahapan Penyusunan RPD dan Renstra PD Tahun 2023-2026..	6
Gambar 2. Tahapan Penyusunan Renstra PD Tahun 2023-2026 .....	7
Gambar 3. Struktur Organisasi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota .....	24
Gambar 4. Kendaraan Operasional Dinas Pertamanan dan Hutan Kota .....	29
Gambar 5. Foto Taman Maju Bersama .....	39
Gambar 6. Tujuh Belas Goals dalam TPB/SDGs .....	60
Gambar 7. Cascading Tujuan dan Sasaran Renstra .....	64

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sumber Daya Manusia (SDM).....	25
Tabel 2. Aset Tidak Bergerak per Tahun 2021.....	26
Tabel 3. Aset Bergerak per Tahun 2021.....	27
Tabel 4. Penambahan Rasio RTH Tahun 2018-2021.....	30
Tabel 5. Data Pembangunan Taman Maju Bersama Tahun 2018-2021.....	31
Tabel 6. Capaian Kinerja Tahun 2018-2021.....	40
Tabel 7. Realisasi Anggaran Tahun 2018-2021.....	49
Tabel 8. Analisa Faktor Internal dan Eksternal Pengembangan Pelayanan.....	50
Tabel 9. Identifikasi Permasalahan.....	53
Tabel 10. Kajian Telaahan RPJMN Disesuaikan dengan Tupoksi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota.....	54
Tabel 11. Kajian Telaahan RPJPD Provinsi DKI Jakarta Disesuaikan dengan Tupoksi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota.....	56
Tabel 12. Kajian Telaahan Renstra Kementerian LHK Disesuaikan dengan Tupoksi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota.....	57
Tabel 13. Kajian Telaahan RTRW Provinsi DKI Jakarta Disesuaikan dengan Tupoksi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota.....	58
Tabel 14. Kajian Telaahan TPB/ SDGs Disesuaikan dengan Tupoksi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota.....	60
Tabel 15. Target Tujuan Tahun 2023-2026.....	65
Tabel 16. Target Sasaran Tahun 2023-2026.....	66
Tabel 17. Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2023-2026.....	68
Tabel 18. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023-2026.....	71
Tabel 19. Target Kinerja (Indikator Kinerja Utama) Tahun 2023-2026.....	90



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat Menyusun Rencana Strategis Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026. Hal ini menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD).

Rencana Strategis Dinas Pertamanan dan Hutan Kota tahun 2023-2026 memiliki perbedaan dengan penyusunan Renstra pada tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena Provinsi DKI Jakarta termasuk salah satu daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir di tahun 2022, maka sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, seluruh Kepala Perangkat Daerah agar menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi tahun 2023-2026 dengan berpedoman kepada dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah tahun 2023-2026.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta ini dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi dan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua.

Jakarta,       Maret 2022  
Kepala Dinas Pertamanan  
dan Hutan Kota  
Provinsi DKI Jakarta

Ir. Suzi Marsitawati, S.Sos., M.Si  
NIP. 196211061989102001



# BAB 1

## Pendahuluan

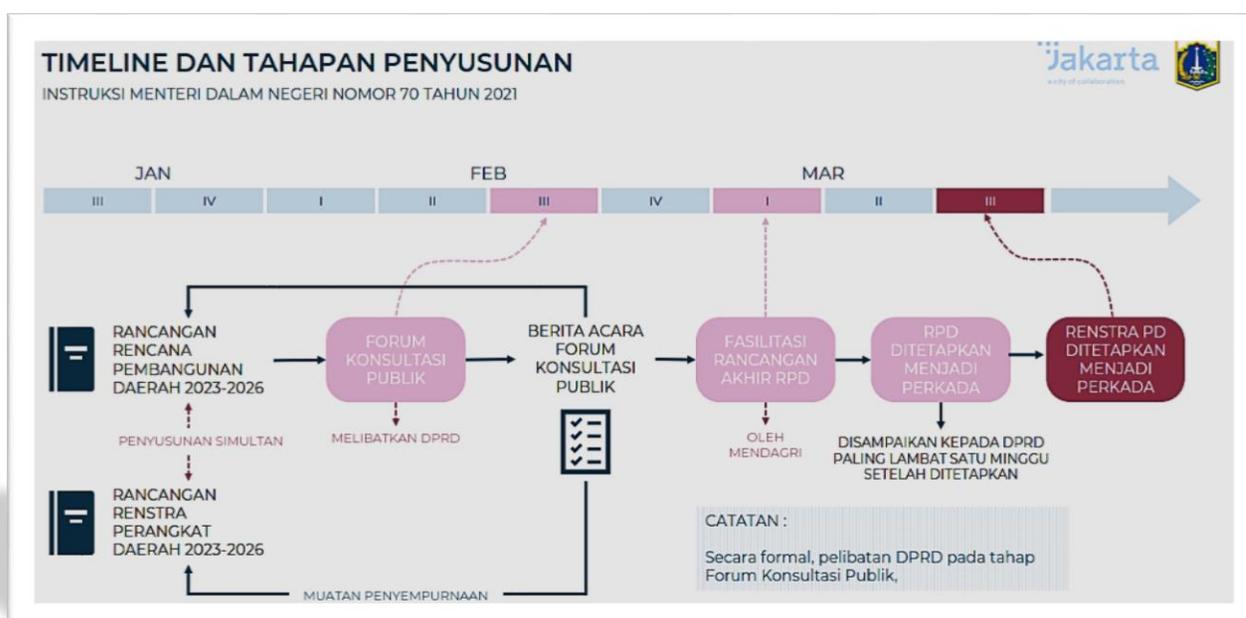
### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan suatu usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah dalam upaya untuk meningkatkan dan lebih pemeratakan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, dan lapangan berusaha, serta diharapkan mampu meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai kewenangannya. Pembangunan daerah yang dilaksanakan tersebut harus sudah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah dimana di dalam pembangunan itu, Pemerintah Daerah harus melibatkan para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing dan didasarkan pada kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah tersebut. Untuk bisa mengakomodir prinsip-prinsip pembangunan itu maka perlu dibuat sebuah perencanaan pembangunan daerah yang matang. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional.

Mengacu pada Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan kepada setiap Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) dengan berkoordinasi bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Idealnya, dokumen Rencana Strategis (Renstra) berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan RPJM Nasional. Namun, untuk tahun 2023-2026 memiliki perbedaan dikarenakan ada kekosongan jabatan Gubernur di Provinsi DKI Jakarta dan baru akan terisi pada tahun 2024, maka daerah tidak memiliki dokumen perencanaan pembangunan

jangka menengah, oleh karena itu penyusunan Renstra berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026. Hal ini sejalan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022. Kemudian di lingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga sudah mengeluarkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 3/SE/2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 dan Rencana Strategis Daerah Tahun 2023-2026.

Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) berfungsi sebagai dokumen kerja Kepala Perangkat Daerah untuk jangka waktu tahun 2023-2026. Kepala Perangkat Daerah harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya sesuai dengan dokumen perencanaan ini kepada Gubernur serta akan menjadi acuan bagi Lembaga audit internal dan eksternal dalam menilai kinerja SKPD. Sebagai sebuah dokumen perencanaan, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertamanan dan Hutan Kota merupakan penjabaran arah kebijakan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta 2023-2026 untuk urusan pemerintahan bidang kehutanan dan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup. Renstra memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk kedua urusan tersebut diatas berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Provinsi DKI Jakarta yang seirama dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), SDGs, KLHS serta Renstra Kementerian/Lembaga yang terkait.



Gambar 1. Timeline dan Tahapan Penyusunan RPD dan Renstra PD Tahun 2023-2026

Tahapan Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) untuk tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan Penyusunan Renstra

- Pembentukan tim penyusun Renstra
- Orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah
- Penyusunan agenda kerja
- Penyiapan data dan informasi

2. Tahap Penyusunan Rancangan Renstra

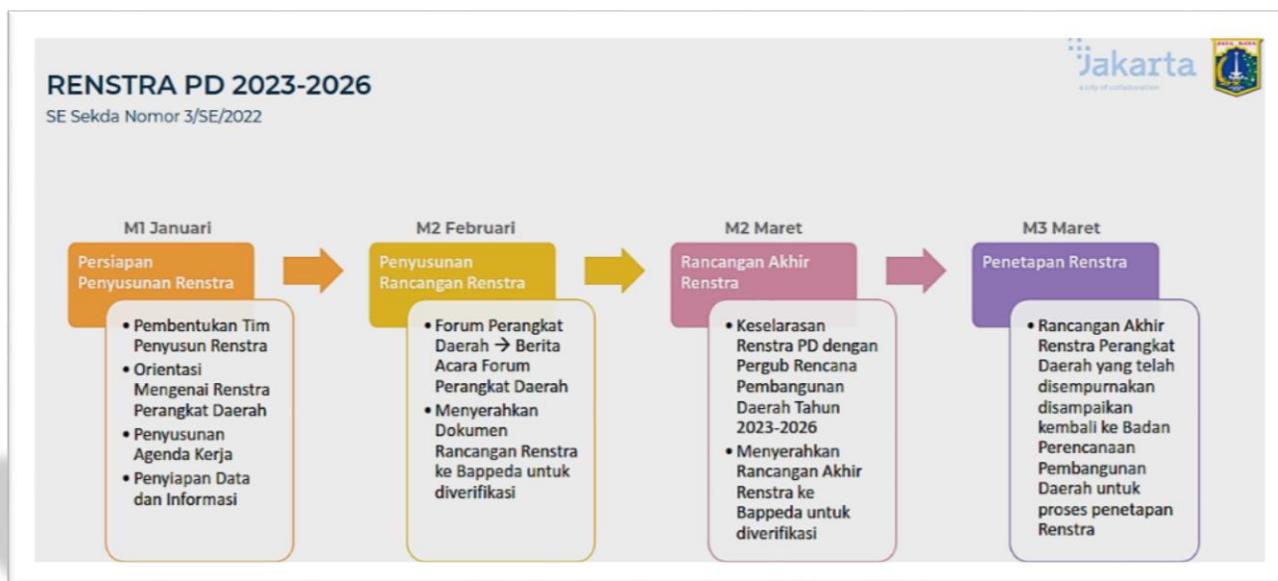
- Forum Perangkat Daerah yang mengeluarkan Berita Acara Forum Perangkat Daerah
- Menyerahkan dokumen rancangan Renstra ke Bappeda untuk diverifikasi

3. Tahap Rancangan Akhir Renstra

- Keselarasan Renstra PD dengan Pergub Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026
- Menyerahkan rancangan akhir Renstra ke Bappeda untuk diverifikasi

4. Tahap Penetapan Renstra

- Rancangan akhir Renstra PD yang telah disempurnakan disampaikan Kembali ke Bappeda untuk proses penetapan Renstra



Gambar 2. Tahapan Penyusunan Renstra PD Tahun 2023-2026

## 1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta tahun 2023-2026, mencakup:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
5. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pemakaman;
6. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu;
8. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2030;
9. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
10. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005 – 2025;
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
12. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 157 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertamanan dan Hutan Kota;
13. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pohon;
14. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Taman;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada tahun 2022;

16. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta 3/SE/2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut ;

#### a. Maksud

Maksud pembuatan Renstra Dinas Pertamanan dan Hutan Kota adalah menjabarkan detail program yang sudah ditetapkan didalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota.

#### b. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta adalah:

1. Sebagai acuan dalam melaksanakan rencana pembangunan daerah khususnya urusan pemerintahan bidang kehutanan dan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
2. Sebagai Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota;
3. Sebagai acuan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja SKPD;
4. Sebagai bahan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana kegiatan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta selama tahun 2023-2026.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Pertamanan dan Hutan Kota 2023-2026 ini terdiri dari 8 (delapan) bagian sesuai dengan SE Sekda Provinsi DKI Jakarta Nomor 3/SE/2022, yaitu:

#### BAB I Pendahuluan

mencakup : Latar Belakang; Landasan Hukum; Maksud dan Tujuan; dan Sistematika Penulisan.

#### Bab II Gambaran Pelayanan

mencakup: Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi; Sumber Daya yang terdiri atas SDM dan Aset/Modal; Kinerja Pelayanan yang terdiri atas Capaian



---

Indikator Kinerja dan Realisasi Anggaran; Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.

- Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis  
mencakup: Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi; Penyelarasan dengan Draft RPD 2023-2026; Telaahan Renstra K/L; Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah; Penentuan Isu-isu Strategis.
- Bab IV Tujuan dan Sasaran
- Bab V Strategi dan Arah Kebijakan
- Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan
- Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
- Bab VIII Penutup



## BAB 2

# Gambaran Pelayanan

Dinas Pertamanan dan Hutan Kota terbentuk sebagai penggabungan antara Dinas Pertamanan dan Pemakaman dengan bidang Kehutanan Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan, yang dikukuhkan dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 157 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertamanan dan Hutan Kota.

### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan dan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan Kawasan permukiman pada sub urusan pertamanan dan pemakaman. Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta sendiri dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dibawah koordinasi Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup. Kedudukan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pengelolaan pertamanan, pengelolaan jalur hijau, pengelolaan dan pelayanan pemakaman, pengelolaan kehutanan serta pengelolaan konservasi flora dan fauna yang memiliki tanggung jawab penuh atas terealisasinya penyelenggaraan dan pelayanannya di Provinsi DKI Jakarta.

Dinas Pertamanan dan Hutan Kota memiliki tugas pokok untuk melaksanakan pengelolaan pertamanan, pemakaman dan kehutanan yang meliputi pembangunan, penataan, pemeliharaan, pembinaan, monitoring, pengawasan dan pengendalian ruang terbuka hijau, taman margasatwa, keindahan kota, serta penyelenggaraan pelayanan di bidang pertamanan, pemakaman dan kehutanan. Tugas pokok ini merupakan penjabaran terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan utama yang menjadi tanggung jawab Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana kerja dan anggaran Dinas;
- b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas;

- c. perumusan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Dinas;
- d. pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Dinas;
- e. pelaksanaan pengelolaan pertamanan;
- f. pelaksanaan pengelolaan jalur hijau;
- g. pelaksanaan pengelolaan kehutanan;
- h. pelaksanaan pengelolaan konservasi flora dan fauna;
- i. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan pemakaman;
- j. pengembangan peran serta masyarakat di bidang kehutanan, pertamanan, jalur hijau dan pemakaman;
- k. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pertamanan dan hutan kota;
- l. pengawasan dan pengendalian izin/ non izin di bidang kehutanan, pertamanan, jalur hijau dan pemakaman;
- m. pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
- n. pengawasan dan penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pertamanan dan Hutan Kota;
- o. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; dan
- p. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.

Tugas pokok tersebut selanjutnya dilaksanakan juga secara operasional di lima wilayah kota oleh Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi dengan mengacu pada program dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta, serta penguatan teknis pada fungsi tugas pendukung lainnya seperti pengadaan tanah untuk RTH, konservasi flora fauna, pengembangan bibit dan pengelolaan data informasi dengan dibentuknya Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 157 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan fungsinya dilengkapi dengan struktur organisasi yang secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas : menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan dan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman pada sub urusan pertamanan dan pemakaman. Fungsi Kepala Dinas antara lain:

1. Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
2. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas;
3. Perumusan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Dinas;
4. Pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Dinas;
5. Pelaksanaan pengelolaan pertamanan;
6. Pelaksanaan pengelolaan jalur hijau;
7. Pelaksanaan pengelolaan kehutanan;
8. Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna;
9. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan pemakaman;
10. Pengembangan peran serta masyarakat di Bidang kehutanan, pertamanan, jalur hijau dan pemakaman;
11. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pertamanan dan hutan kota;
12. Pengawasan dan pengendalian izin/non izin di bidang kehutanan, pertamanan, jalur hijau dan pemakaman;
13. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
14. Pengawasan dan penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertamanan dan hutan kota
15. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; dan
16. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah

b. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Dinas dan membawahi empat sub bagian yakni subbagian umum, kepegawaian, program dan pelaporan serta keuangan. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan di lingkungan Dinas. Sementara fungsi Sekretariat antara lain:

1. Pengoordinasian penyusunan bahan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
2. Pengoordinasian pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas;
3. Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
4. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
5. Perumusan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;

6. Pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
7. Pengelolaan keuangan, kepegawaian dan barang milik daerah Dinas;
8. Pengelolaan kerumahtanggaan, ketatausahaan, ketatalaksanaan, kearsipan dan kehumasan Dinas;
9. Pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan/atau pengawasan;
10. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Unit Kerja pada Dinas;
11. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya; dan
12. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

c. Bidang Kehutanan

Bidang Kehutanan dipimpin oleh Kepala Bidang Kehutanan dan membawahi tiga seksi yakni seksi perencanaan kehutanan, seksi konservasi sumber daya hutan dan daerah aliran sungai serta seksi pemanfaatan dan penatausahaan hasil hutan. Sementara fungsi Bidang Kehutanan antara lain:

1. Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
2. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
3. Perumusan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
4. Pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
5. Pelaksanaan pembangunan, penataan, pemeliharaan dan pengembangan hutan produksi, hutan lindung dan hutan kota;
6. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kawasan hutan dan hutan kota, tumbuh-tumbuhan, satwa liar tidak dilindungi dan non appendix CITES;
7. Pelaksanaan operasi penyelidikan, penyidikan dan penindakan pelanggaran dan penegakan hukum lingkup bidang pertamanan, kehutanan dan pemakaman;
8. Pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan konservasi Daerah Aliran Sungai;
9. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengusaha peredaran dan pemanfaatan hasil hutan;

10. Pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan terhadap kegiatan pengukuran dan pengujian, pengawetan, pengeringan, penimbunan dan industri primer hasil hutan serta tempat penampung terdaftar;
11. Pelaksanaan pengembangan konservasi sumberdaya hutan;
12. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan program kerja Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
13. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi atas terbitnya izin dan rekomendasi;
14. Penegakan peraturan perundang-undangan lingkup Bidang Kehutanan;
15. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi penegak hukum dalam rangka pengawasan dan pengendalian kehutanan;
16. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya; dan
17. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

d. Bidang Pertamanan

Bidang Pertamanan dipimpin oleh Kepala Bidang Pertamanan dan membawahi tiga seksi yakni seksi perencanaan pertamanan, seksi taman kota serta seksi tata hias dan ornamen kota. Bidang Pertamanan mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan pendataan, perancangan, pembangunan, penataan dan pemeliharaan taman, tata hias dan ornamen kota.. Bidang Pertamanan menyelenggarakan fungsi;

1. Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
2. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
3. Perumusan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
4. Pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
5. Penyiapan pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan taman;
6. Pelaksanaan pembangunan, penataan, pemeliharaan, pengembangan taman, tata hias kota dan ornamen kota;
7. Pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, penataan, koordinasi pemeliharaan taman, tata hias kota dan ornamen kota;
8. Pelaksanaan pelayanan dekorasi dan pemasangan umbul-umbul;
9. Pengelolaan taman, tata hias dan ornamen kota;

10. Pelaksanaan pengembalian fungsi taman, tata hias dan ornamen kota;
11. Penegakan peraturan perundang-undangan lingkup Bidang Pertamanan dan berkoordinasi dengan instansi penegak hukum lainnya;
12. Pelaksanaan monitoring dan konsultasi pembangunan, penataan dan pemeliharaan taman, tata hias dan ornamen kota;
13. Pelaksanaan evaluasi perancangan dan pembangunan taman, tata hias dan ornamen kota;
14. Pelaksanaan koordinasi dan pemberian rekomendasi teknis perizinan sesuai lingkup tugasnya;
15. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya; dan
16. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

e. Bidang Jalur Hijau

Bidang Jalur Hijau dipimpin oleh Kepala Bidang Jalur Hijau dan membawahi tiga seksi yakni seksi perencanaan jalur hijau, seksi jalur hijau jalan, serta seksi jalur hijau penyempurna dan tepian air. Bidang Jalur Hijau mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan penyusunan kebijakan, inventarisasi, perencanaan, pembangunan, penataan dan pemeliharaan jalur hijau dan tepian air. Bidang jalur hijau menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
2. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
3. Perumusan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
4. Pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
5. Pelaksanaan inventarisasi dan pemetaan jalur hijau jalan, jalur hijau penyempurna dan tepian air;
6. Pelaksanaan pembangunan, penataan dan pemeliharaan jalur hijau jalan, jalur hijau penyempurna dan tepian air;
7. Pelaksanaan pengawasan teknis kegiatan pembangunan, penataan dan pemeliharaan jalur hijau;
8. Pelaksanaan penilaian, evaluasi dan rekomendasi teknis perizinan/non perizinan lingkup Bidang Jalur Hijau;

9. Pelaksanaan pendataan jalur hijau jalan dan jalur hijau penyempurna dalam rangka penyusunan database;
10. Koordinasi perencanaan penyediaan lahan jalur hijau;
11. Penyusunan rencana teknis pembangunan, penataan, pemeliharaan jalur hijau jalan dan jalur hijau penyempurna;
12. Pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, penataan, serta koordinasi pemeliharaan jalur hijau jalan dan jalur hijau penyempurna;
13. Penegakan peraturan perundang-undangan lingkup Bidang Jalur Hijau dan berkoordinasi dengan instansi penegak hukum lainnya;
14. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perancangan, pembangunan, penataan serta pemeliharaan jalur hijau jalan dan jalur hijau penyempurna;
15. Pelaksanaan koordinasi pengembalian fungsi jalur hijau jalan dan jalur hijau penyempurna
16. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya; dan
17. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

f. Bidang Pemakaman

Bidang Pemakaman dipimpin oleh Kepala Bidang Pemakaman dan membawahi tiga seksi yakni seksi perencanaan pemakaman, seksi pemakaman serta seksi pelayanan pemakaman. Bidang Pemakaman mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan pendataan, perancangan, pembangunan, penataan taman pemakaman, pengelolaan taman pemakaman umum dan pelayanan pemakaman. Bidang pemakaman menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
2. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
3. Perumusan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
4. Pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
5. Pelaksanaan inventarisasi taman pemakaman dan perpetakan makam;
6. Pelaksanaan pembangunan, penataan taman pemakaman dan pengembalian fungsi taman pemakaman;

7. Pelaksanaan pelayanan pengangkutan, pemulasaraan jenazah, perpetakan dan pemindahan jenazah;
  8. Pelaksanaan pengaduan pelayanan pemakaman;
  9. Penegakan peraturan perundangan-undangan lingkup Bidang Pemakaman dan berkoordinasi dengan instansi penegak hukum lainnya;
  10. Pelaksanaan evaluasi perancangan pembangunan dan penataan taman pemakaman;
  11. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya; dan
  12. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- g. Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi
- Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi dipimpin oleh Kepala Suku Dinas dan membawahi subbagian tata usaha, seksi perencanaan, seksi taman dan hutan kota, seksi jalur hijau dan pemakaman, satuan pelaksana pertamanan dan hutan kota kecamatan, satuan pelaksana taman pemakaman umum serta satuan pelaksana taman. Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota berada di 5 (lima) wilayah kota administrasi yakni Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi mempunyai tugas membantu Dinas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan bidang kehutanan dan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman pada sub urusan pertamanan dan pemakaman pada wilayah kota.
- Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi mempunyai fungsi :
1. Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
  2. Penyiapan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
  3. Perumusan proses bisnis, standar dan prosedur Suku Dinas;
  4. Pelaksanaan proses bisnis, standar dan prosedur Suku Dinas;
  5. Penyiapan pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan pertamanan, jalur hijau, kehutanan;
  6. Perencanaan teknis, pelaksanaan kegiatan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan pertamanan, jalur hijau, kehutanan;
  7. Pelaksanaan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan pertamanan, jalur hijau, kehutanan;

8. Pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan pembangunan, peningkatan, pertamanan, jalur hijau, kehutanan termasuk yang dilaksanakan oleh pihak lain;
9. Pengawasan dan penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertamanan dan hutan kota
10. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana pemakaman
11. Pelaksanaan pembinaan tenaga pengamanan pertamanan, jalur hijau, kehutanan dan pemakaman;
12. Pelaksanaan pelayanan pemakaman jenazah, penggalian, pemindahan kerangka jenazah dan angkutan jenazah di dalam provinsi DKI Jakarta;
13. Pelaksanaan pembangunan, penataan dan pemeliharaan tata hias dan ornamen kota;
14. Pelaksanaan kesekretariatan Suku Dinas Kota;
15. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya; dan
16. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

h. Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan

Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan dipimpin oleh Kepala Unit Pengelola dan membawahi empat subbagian/seksi yakni subbagian tata usaha, seksi konservasi, peragaan, penelitian dan pengembangan, seksi pelayanan dan informasi serta seksi prasarana dan sarana. UP TMR memiliki tugas melaksanakan pengelolaan Taman Margasatwa Ragunan sebagai lembaga konservasi. Sementara fungsi dari UP TMR antara lain:

1. Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
2. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
3. Perumusan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan;
4. Pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan;
5. Pelaksanaan pengelolaan, pengembangan dan pelestarian lingkungan khusus dalam Kawasan Taman Margasatwa Ragunan;
6. Pelaksanaan penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan/perawatan keanekaragaman fauna dan flora;

7. Pelaksanaan pengelolaan kegiatan rekreasi di Taman Margasatwa Ragunan;
  8. Pelaksanaan pemungutan, pencatatan, pembukuan, penyeteroran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan pendapatan Taman Margasatwa Ragunan;
  9. Pelaksanaan kerjasama dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta baik dalam negeri maupun luar negeri dalam rangka pengembangan Taman Margasatwa Ragunan;
  10. Pelaksanaan penghimpunan, pengolahan, pemeliharaan, penyajian, pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi mengenai satwa/fauna, flora dan habitat;
  11. Penyelenggaraan promosi, publikasi dan pameran flora dan habitatnya;
  12. Pelaksanaan penelitian, pendidikan, promosi/pameran yang berkenaan dengan fauna, flora, habitat dan konservasi;
  13. Pelaksanaan pengamanan, pengawasan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan dengan segala kelengkapannya;
  14. Pelaksanaan kesekretariatan Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan;
  15. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya; dan
  16. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- i. Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan
- Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan dipimpin oleh Kepala Unit dan membawahi empat subbagian/satuan pelaksana yakni subbagian tata usaha, satuan pelaksana pembibitan dan budidaya tanaman, satuan pelaksana pengembangan tanaman serta satuan pelaksana pelayanan. UP PTP memiliki tugas membantu Dinas menyelenggarakan pembibitan dan budidaya tanaman, perlindungan tanaman, pelayanan, pengembangan tanaman perkotaan serta pengolahan limbah hijauan. Sementara fungsi dari UP PTP antara lain:
1. Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
  2. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
  3. Perumusan proses bisnis, standar dan prosedur Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan;
  4. Pelaksanaan proses bisnis, standar dan prosedur Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan;

5. Pelaksanaan perencanaan, penyediaan dan penanaman pohon induk tanaman perkotaan;
6. Pelaksanaan produksi dan pengembangan tanaman perkotaan;
7. Pelaksanaan pelayanan dan permohonan tanaman;
8. Pelaksanaan pengembangan pembibitan dan budidaya tanaman perkotaan;
9. Pengolahan limbah hijauan dan distribusi hasil olahan limbah hijauan;
10. Pelaksanaan perlindungan dan Kesehatan pohon serta pelayanan konsultasi dan supervisi terhadap tanaman perkotaan;
11. Pelaksanaan perawatan serta pemeliharaan prasarana dan sarana Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan;
12. Pelaksanaan pelayanan konsultasi dan supervisi terhadap tanaman perkotaan;
13. Pelaksanaan pengamanan, pengawasan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana;
14. Pelaksanaan kesekretariatan Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan;
15. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya; dan
16. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

j. Unit Pengadaan Tanah Pertamanan dan Hutan Kota

Unit Pengadaan Tanah Pertamanan dan Hutan Kota dipimpin oleh Kepala Unit dan membawahi tiga bagian yakni subbagian tata usaha, satuan pelaksana pengadaan tanah wilayah I, serta satuan pelaksana pengadaan tanah wilayah II. UP Tanah memiliki tugas melaksanakan dan mengoordinasikan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyeraha hasil pengadaan tanah untuk kebutuhan pembangunan prasarana kehutanan. Sementara fungsi UP Tanah antara lain:

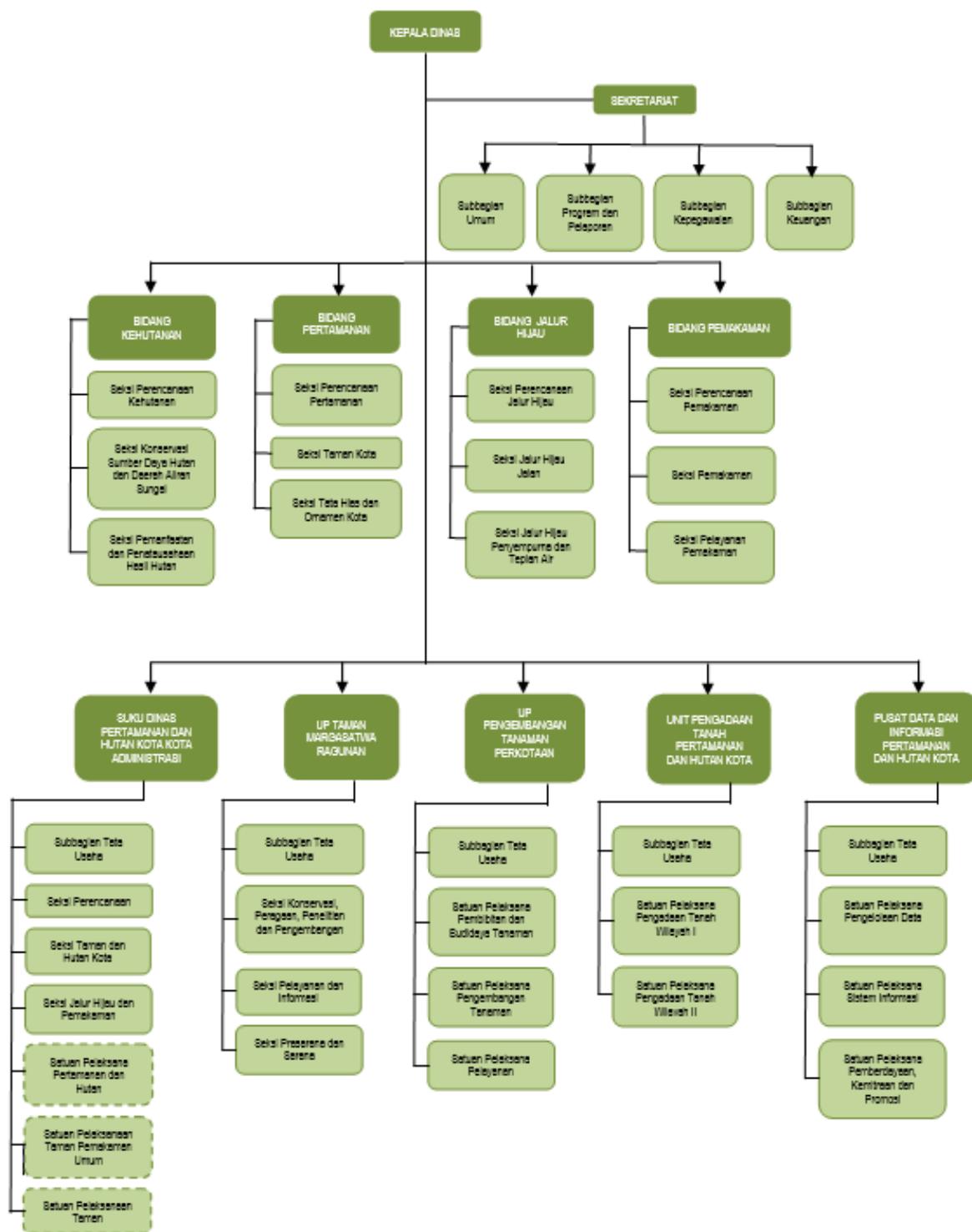
1. Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
2. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
3. Perumusan proses bisnis, standar dan prosedur Unit Pengadaan Tanah Pertamanan dan Hutan Kota;
4. Pelaksanaan proses bisnis, standar dan prosedur Unit Pengadaan Tanah Pertamanan dan Hutan Kota;
5. Pelaksanaan perencanaan pengadaan tanah bagi prasarana pertamanan dan hutan kota;

6. Pelaksanaan pengadaan tanah bagi prasarana pertamanan dan hutan kota baik yang dibiayai pemerintah daerah maupun kerjasama dengan dunia usaha dan instansi pemerintah/swasta lainnya;
  7. Pelaksanaan pengurusan sertifikasi tanah bagi prasarana pertamanan dan hutan kota;
  8. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi pemerintah/swasta dalam penyelesaian masalah sosial dan hukum sehubungan dengan pengadaan tanah untuk prasarana pertamanan dan hutan kota;
  9. Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, ketatausahaan dan kerumahtanggaan Unit Pengadaan Tanah Pertamanan dan Hutan Kota;
  10. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja unit koordinasi dengan instansi pemerintah/swasta dalam penyelesaian masalah social dan hukum sehubungan dengan pengadaan tanah untuk prasarana pertamanan dan hutan kota, sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
  11. Pelaksanaan kesekretariatan Unit Pengadaan Tanah Pertamanan dan Hutan Kota;
  12. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya; dan
  13. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- k. Pusat Data dan Informasi Pertamanan dan Hutan Kota
- Pusat Data dan Informasi Pertamanan dan Hutan Kota dipimpin oleh Kepala Pusdatin dan membawahi empat bagian yakni subbagian tata usaha, satuan pelaksana pengelolaan data, satuan pelaksana sistem informasi serta satuan pelaksana pemberdayaan, kemitraan dan promosi. Pusdatin memiliki tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi yang meliputi pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan dan pengembangan data dan informasi serta pelaksanaan program peran serta masyarakat. Sementara fungsi Pusdatin antara lain:
1. Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
  2. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
  3. Perumusan proses bisnis, standar dan prosedur Pusat Data dan Informasi Pertamanan dan Hutan;
  4. Pelaksanaan proses bisnis, standar dan prosedur Pusat Data dan Informasi Pertamanan dan Hutan;

5. Penyiapan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan, pelayanan dan pengembangan sistem informasi Dinas;
6. Penyiapan pelaksanaan penyebarluasan/publikasi informasi kebijakan dan kegiatan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota berbasis website maupun dengan media komunikasi lainnya;
7. Penyiapan pelaksanaan pelayanan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkup Dinas Pertamanan dan Hutan Kota;
8. Penyiapan pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan indikator kinerja (Key Performance Indicators) terhadap pelayanan di Dinas;
9. Penyiapan pelaksanaan kegiatan penyuluhan, pelatihan, lomba, lokakarya serta memberi penghargaan lingkup kehutanan, pertamanan, jalur hijau dan pemakaman;
10. Pelaksanaan kesekretariatan Pusat Data dan Informasi;
11. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya; dan
12. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

I. Kelompok Jabatan Fungsional

Secara rinci struktur organisasi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta terlihat pada bagan dibawah.



Gambar 3. Struktur Organisasi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota sesuai Pergub Prov. DKI Jakarta No.157 Tahun 2019

## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sesuai data pada Bulan Januari Tahun 2022, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta memiliki 569 orang pegawai. Sementara kebutuhan pegawai sesuai analisa jabatan adalah sebanyak 889 pegawai. Saat ini jumlah sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota dapat diklasifikasikan berdasarkan golongan dan pendidikan seperti yang tercantum dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1. Sumber Daya Manusia (SDM)

NO	KLASIFIKASI	JUMLAH PEGAWAI DINAS, SUDIN DAN UPT										JUMLAH
		DINAS	SUDIN PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA					UP PENGEMBANGAN TANAMAN PERKOTAAN	UNIT PENGADAAN TANAH PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	PUSDATIN	UP TAMAN MARGASATWA RAGUNAN	
			JAKPUS	JAKUT	JAKBAR	JAKSEL	JAKTIM					
<b>A</b>	<b>GOLONGAN</b>	<b>139</b>	<b>43</b>	<b>32</b>	<b>38</b>	<b>59</b>	<b>54</b>	<b>22</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>165</b>	<b>569</b>
	IV	8	3	2	4	6	9	2	1	2	3	40
	III	104	30	25	29	36	37	15	7	6	50	339
	II	27	10	5	5	17	8	5	0	1	98	176
	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14
<b>B</b>	<b>PENDIDIKAN</b>	<b>139</b>	<b>43</b>	<b>32</b>	<b>38</b>	<b>59</b>	<b>54</b>	<b>22</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>165</b>	<b>569</b>
	S2	14	5	2	5	6	8	1	3	2	9	55
	S1	76	21	18	22	23	24	13	4	3	26	230
	D III/II	13	2	4	1	5	4	4	1	3	28	65
	SMA	33	14	7	10	22	17	4	0	1	83	191
	SMP	3	1	1	0	1	0	0	0	0	6	12
	SD	0	0	0	0	2	1	0	0	0	13	16

(Sumber : Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Januari 2022)

### 2.2.2 Aset/Modal

Aset yang dimiliki oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota dapat digolongkan berupa aset bergerak dan tidak bergerak. Aset tidak bergerak yang dimiliki oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota berupa sarana prasarana/bangunan gedung kantor, sedangkan aset bergerak berupa kendaraan operasional dan peralatan kerja Dinas Pertamanan dan Hutan Kota.

#### a. Aset tidak bergerak

Sarana dan Prasarana kantor/ bangunan gedung kantor yang dimiliki Dinas Pertamanan dan Hutan Kota adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Aset Tidak Bergerak per Tahun 2021

Jenis	Nama	Lokasi	Jumlah/Luas
Kantor	▪ Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Prov DKI Jakarta	▪ Jl. Aipda KS. Tubun No.1	1 Lokasi
Gedung	▪ Kantor & Fasilitas	1. Ciganjur, Jakarta Selatan	686 m2
		2. Srengseng, Jakarta Selatan	593 m2
		3. Jl.Taman Jatibaru,Jak-Pus	2.028 m2
		4. Jl. Leuser, Jakarta Selatan	227 m2
		5. Jl. Langsung, Jakarta Selatan	129 m2
		6. Jl. HR Harsono,Jak-Selatan	35 m2
		7. Jl. Tebet Barat,Jak-Selatan	114 m2
	▪ Aklimator	Ciganjur, Jakarta Selatan	225 m2
	▪ Laboratorium	Ciganjur, Jakarta Selatan	225 m2
	▪ Lath House	1. Ciganjur, Jakarta Selatan	10.267 m2
		2. Srengseng, Jakarta Barat	10.563 m2
		3. Tebet, Jakarta Selatan	8.488 m2
▪ Green House	Ciganjur, Jakarta Selatan	336 m2	
▪ Persemaian	Srengseng, Jakarta Barat	86.4 m2	
	Ciganjur, Jakarta Selatan	64.8 m2	
	Tebet, Jakarta Selatan	57.6 m2	
▪ Kursus Keterampilan (Bina Taman)	Jl. Langsung, Jakarta Selatan Jl. HR Harsono,	6 buah & 106 m	
Kebun Bibit	▪ KB Ragunan	Jl. HR Harsono, Jakarta Selatan	80.000 m2
		Jl. Langsung Jakarta Selatan	
	▪ KB Langsung		11.500 m2
	▪ KB Leuser	Jl. Leuser, Jakarta Selatan	4.125 m2
	▪ KB Ciganjur	Ciganjur, Jakarta Selatan	50.560 m2
	▪ KB Tebet	Jl. Tebet Barat, Jakarta Selatan	48.000 m2
▪ KB Srengseng	Srengseng Jakarta Barat	80.500 m2	
Pool/ Gudang	▪ Pool kendaraan Ragunan	Jl. Kahfi I, Jakarta Selatan	132 m2
	▪ Gudang	1. Jl. Leuser, Jakarta Selatan	294 m2
		2. Jl. Langsung Jakarta Selatan	101 m2
	3. Jl. HR Harsono, Jak-Sel	54 m2	

Jenis	Nama	Lokasi	Jumlah/Luas
		4. Jl. Khafi I, Jakarta Selatan	38 m <sup>2</sup>
		5. Jl. Tebet Barat, Jak-Sel	66 m <sup>2</sup>
		6. Srengseng, Jakarta Barat	54 m <sup>2</sup>
Pos Jaga		Jl. Lap. Banteng, Jakarta Pusat	24 m <sup>2</sup>
		Jl. Langsat, Jakarta Selatan	9 m <sup>2</sup>

(Sumber : Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, 2022)

#### b. Aset bergerak

Ketersediaan kendaraan operasional dan peralatan kerja milik Dinas Pertamanan dan Hutan Kota serta jajarannya merupakan elemen penting agar terlaksananya kegiatan rutin Dinas Pertamanan dan Hutan Kota. Terutama untuk kegiatan pemeliharaan yang semuanya dilakukan secara swakelola serta pelayanan pemakaman. Oleh karena itu Dinas Pertamanan dan Hutan Kota dan jajarannya berusaha optimal dalam mempersiapkan pelaksanaan pemeliharaan dan pelayanan dengan melakukan pengadaan serta pemeliharaan kendaraan operasional dan peralatan kerja.

Tabel 3. Aset Bergerak per Tahun 2021

No	Jenis Sarana/Prasarana	Dinas	Sudin Jakpus	Sudin Jaktim	Sudin Jakut	Sudin Jaksel	Sudin Jakbar	UP PTP	UP TMR	Total
1	Mobil Jenazah	27	3	0	5	8	3	0	0	46
2	Truk Tangga	3	2	2	3	4	1	4	0	19
3	Sepeda Motor	49	19	30	41	52	64	10	22	287
4	Gerobak Motor	4	28	8	11	25	23	6	5	110
5	Mobil Minibus	7	1	0	2	2	0	0	7	19
6	Mobil Pick Up	58	26	29	28	43	37	17	15	253
7	Mobil Barang	0	0	0	0	0	0	0	1	1
8	Mobil Tangki Air	99	50	43	23	43	46	1	7	312
9	Kendaraan Khusus/ Dump Truck	41	17	27	20	21	27	9	14	176
10	Mobil Ambulance	10	0	0	0	0	0	0	1	11
11	Grimonz Tangki Tinja	0	0	0	0	0	0	0	1	1
12	Kendaraan Penyapu Sampah	0	0	0	0	0	0	0	6	6
13	Forklift	2	0	0	0	0	0	0	1	3
14	Backhoe Loader	0	0	0	1	0	0	0	1	2
15	Mobil Crane	3	1	1	3	2	2	0	2	14
16	Kendaraan Bermotor Khusus lain-lainnya (contoh mobil golf, mobil pedestrian)	0	2	1	0	0	0	0	11	14
17	Mobil Karoseri Khusus Security	0	0	0	2	0	0	0	2	4

No	Jenis Sarana/Prasarana	Dinas	Sudin Jakpus	Sudin Jaktim	Sudin Jakut	Sudin Jaksel	Sudin Jakbar	UP PTP	UP TMR	Total
18	Mesin Potong Rumput	168	128	336	228	270	185	18	160	1493
19	Mesin Potong Pohon	67	58	39	74	79	31	6	41	395
20	Alkon	88	116	80	137	65	32	7	14	539
21	Alkon Tanki	60	41	42	23	35	42	1	0	244
22	Mobil Compactor	0	2	0	0	0	0	0	1	3
23	Truk Armroll	0	0	0	0	0	0	0	2	2
24	Light Truck	0	0	0	0	0	0	0	1	1
25	Mesin Bor tanah	0	0	0	0	0	0	4	0	4
26	Mesin kompos	0	0	0	0	0	0	6	0	6
27	Mesin Las	16	4	0	3	7	2	1	4	37
28	Genset	15	5	5	6	29	2	1	2	65
29	Traktor Roda 4	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30	Traktor Tangan	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31	Kulkas Laboratorium	0	0	0	0	0	0	2	0	2
32	Lemari Laboratorium Pintu kaca	0	0	0	0	0	0	1	0	1
33	Lemari Laboratorium Powder Coating Steel	0	0	0	0	0	0	1	0	1
34	Mobil Derek	0	0	0	0	1	0	0	0	1
35	Sepeda Motor Khusus/ Bajaj TVS	0	0	0	0	10	0	0	0	10
36	Portable Audio System	10	41	25	0	62	20	0	3	161
37	Mesin Gerinda Tangan	20	0	0	2	0	3	0	0	25
38	Mesin Steam	13	0	0	1	0	0	0	0	14
39	Compresor	1	0	0	0	0	0	0	0	1
40	Mesin Pangkas Tanaman Hias	0	0	0	0	11	0	3	0	3
41	Mini Skid Steer	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42	Power Sprayer	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43	Arborsonic 3D Tomograph	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44	Gas Analyzer	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45	Sieve Shaker	0	0	0	0	0	0	2	0	2
46	Growth Chamber	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47	Oven	0	0	0	0	0	0	2	0	2
48	pH Meter	0	0	0	0	0	0	1	0	1
49	Conductivity Meter	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50	Autoclave	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51	Water Destilator	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52	Laminar Air Flow Cabinet	0	0	0	0	0	0	1	0	1
53	Fume Hood	0	0	0	0	0	0	5	0	5
54	Timbangan Analitik	0	0	0	0	0	0	5	0	5
55	Thermohyrometer	0	0	0	0	0	0	5	0	5
56	Soil Tester	0	0	0	0	0	0	1	0	1
57	Nitrogen Analysis Kjehldahl	0	0	0	0	0	0	3	0	3
58	Mesin Pengayak Kompos	0	0	0	0	0	10	0	0	21
59	Wood Chipper	0	0	0	1	1	0	4	0	5
	<b>TOTAL</b>	<b>761</b>	<b>544</b>	<b>668</b>	<b>614</b>	<b>770</b>	<b>530</b>	<b>146</b>	<b>324</b>	<b>4356</b>

(Sumber : Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, 2021)



Gambar 4. Kendaraan Operasional Dinas Pertamanan dan Hutan Kota

## 2.3 Kinerja Pelayanan

Kinerja Pelayanan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota dapat dilihat pada capaian target indikator kinerja dan realisasi anggaran Dinas Pertamanan dan Hutan Kota sejak lima tahun terakhir. Capaian target indikator kinerja dan realisasi anggaran akan dibahas pada sub bab dibawah ini.

### 2.3.1 Capaian Indikator Kinerja

Salah satu yang menjadi indikator kinerja utama (IKU) dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota adalah penambahan rasio RTH di Provinsi DKI Jakarta. Dari target penambahan rasio RTH untuk tahun 2018-2022 sebesar 0,173% (113, 34 Ha), tercapai seluas 0,161% (105,15 Ha) di tahun 2021 ini. Berikut rincian penambahan rasio RTH untuk taman, makam dan hutan tahun 2018-2021:

Tabel 4. Penambahan Rasio RTH Tahun 2018-2021

No	Jenis RTH	Penambahan Rasio RTH																		Akumulasi Target sampai tahun 2021		Akumulasi Realisasi sampai tahun 2021	
		Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021				Tahun 2022					
		Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target					
		Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
1	Hutan	5.56	0.0085%	16.75	0.026%	7.5	0.0115%	1.86	0.0029%	7.5	0.0115%	0	0%	1.75	0.0026%	0	0%	1.75	0.0026%	22.31	0.034%	18.61	0.029%
2	Taman	28.89	0.044%	25.63	0.039%	12.5	0.019%	16.80	0.0257%	12.5	0.019%	19.27	0.0295%	10	0.0151%	13.88	0.0212%	10	0.0151%	63.89	0.097%	75.58	0.115%
3	Makam	8.89	0.014%	4.82	0.007%	3	0.0046%	2.77	0.0042%	3	0.0046%	3.37	0.0052%	0.25	0.0004%	0	0%	0.25	0.0004%	15.14	0.024%	10.96	0.016%
Total		43.34	0.0665%	47.20	0.072%	23	0.0351%	21.43	0.0328%	23	0.0351%	22.64	0.0346%	12	0.0181%	13.88	0.0212%	12	0.0181%	101.34	0.155%	105.15	0.161%

(Sumber : Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, 2021)

Selain itu, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta juga melakukan pembangunan Taman Maju Bersama dari tahun 2018-2021 sebanyak 69 taman dengan rincian lokasi sebagai berikut:

Tabel 5. Data Pembangunan Taman Maju Bersama Tahun 2018-2021

Tahun 2018				
No	Lokasi	Alamat	Volume	Satuan
1	Pembangunan RTH Taman di Jl. Assakinah Kel. Kebagusan Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan	Jl. Assakinah Kel. Kebagusan Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan	2.180	m2
2	Pembangunan RTH Taman di Jl. Gunung Balong II Kel. Lebak Bulus, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan	Jl. Gunung Balong II Kel. Lebak Bulus, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan	2.011	m2
3	Pembangunan RTH Taman di Jl. Lapangan Tembak, Kel. Kelapa Dua Wetan, Kec. Ciracas, Jakarta Timur	Jl. Lapangan Tembak, Kel. Kelapa Dua Wetan, Kec. Ciracas, Jakarta Timur	4.550	m2
4	Pembangunan RTH Taman di Jl. Madrasah Bawah RW 12 Kel. Bintaro, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan	Jl. Madrasah Bawah RW 12 Kel. Bintaro, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan	2.298	m2
5	Pembangunan RTH Taman di Jl. Penggilingan Baru RT 11 RW 03 Kel. Duku, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur	Jl. Penggilingan Baru RT 11 RW 03 Kel. Duku, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur	6.050	m2
6	Pembangunan RTH Taman di Jl. Swakarsa RW 03 Kel. Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur	Jl. Swakarsa RW 03 Kel. Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur	1.492	m2
7	Pembangunan RTH Taman di Jl. SMU 99 Kel. Cibubur, Kec. Ciracas, Jakarta Timur	Jl. SMU 99 Kel. Cibubur, Kec. Ciracas, Jakarta Timur	3.003	m2
8	Pembangunan RTH Jl. Aselih, Jakarta Selatan	Jl. Aselih, Jakarta Selatan	8.689,71	m2
9	Pembangunan RTH Jl. H. Ipin RT.011 RW.01, Jakarta Selatan	Jl. H. Ipin RT.011 RW.01, Jakarta Selatan	8.920	m2
<b>Total 2018</b>			<b>39.193,71</b>	<b>m2</b>

**Tahun 2019**

No	Lokasi	Alamat	Volume	Satuan
1	RTH Warung Sila	Jl. Warung Sila No. 17 RT. 004 RW. 05, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan	3.674	m2
2	RTH Antariksa RT. 09	Jl. Antariksa RW. 02 Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan	4.987	m2
3	RTH Kampung Pedaengan	Kampung Pedaengan RT 004 RW 08, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur	9.596	m2
4	RTH Centex	Jl. Centex Gang Masjid Kel. Ciracas Kec. Ciracas Jakarta Timur	7.490	m2
5	RTH Cilangkap Baru (Al Hamid)	Jl. Cilangkap Baru RT.004 RW.03, Kelurahan Pondok Ronggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur	19.493	m2
6	RTH Penggilingan	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Taman di RTH RT 04/07 Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung, Jakarta Timur	5.152	m2
7	Mutiara Prima	Komplek Taman Mutiara Prima Kel. Kebun Jeruk Kec. Kebun Jeruk Jakarta Barat	862	m2
8	RTH Mangga XIV	Jl. Mangga XIV RT. 07 RW.03, Kelurahan Tanjung Duren Barat, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat	3.009	m2
9	RTH Rorotan	Jl. Rorotan (kp. Kandang Sapi)Kel. Rorotan Kec. Cilincing, Jakarta Utara	11.498	m2
10	RTH Taman Kp. Baru	Pembangunan RTH Taman Kp. Baru Kembangan Jakarta Barat	26.242	m2

**Tahun 2019**

No	Lokasi	Alamat	Volume	Satuan
11	RTH Sungai Kendal	Pembangunan RTH Taman di Jl. Sungai Kendal Kel. Rorotan Kec. Cilincing, Jakarta Utara	40.749	m2
12	RTH Kampung Jati	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Taman Jl.Kp. Jati Kel. Rambutan Kec. Ciracas, Jakarta Timur	3.677	m2
13	RTH Jl. Panglima Polim II RT 003 RW 07, Kel. Melawai, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan	Jl. Panglima Polim II RT 003 RW 07, Kel. Melawai, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan	1.787	m2
14	RTH Jl. Setapak RT 003 RW 004, Kel. Cilangkap, Kec. Cipayung, Jakarta Timur	Jl. Setapak RT 003 RW 004, Kel. Cilangkap, Kec. Cipayung, Jakarta Timur	2.966	m2
15	RTH Taman Jalur Hijau di Jl. Kebagusan Raya, Jakarta Selatan (Taman Papyrus) (Lanjutan)	Jl. Kebagusan Raya, Jakarta Selatan (Taman Papyrus)	3.631	m2
16	RTH Taman Jalur Hijau di Jl. Marunda, Jakarta Utara (Taman Bintaro) (Lanjutan)	Jl. Marunda, Jakarta Utara (Taman Bintaro)	8.000	m2
17	RTH Jl. Makam Barat, Jakarta Timur	Jl. Makam Barat, Jakarta Timur	5.539	m2
18	RTH Jl. Tipar, Jakarta Timur	Jl. Tipar, Kel. Pekayon, Kec. Pasar Rebo, Jakarta Timur	8.250	m2
19	RTH Jl. Sarang Bango Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara (Lanjutan)	Jl. Sarang Bango Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara	11.284	m2
20	RTH Jl. Mandor Hasan, Kel. Bambu Apus, Kec. Cipayung, Jakarta Timur	Jl. Mandor Hasan, Kel. Bambu Apus, Kec. Cipayung, Jakarta Timur	12.682	m2
21	RTH Taman Jalur Hijau di Jl. Pinang, Jakarta Timur (Lanjutan)	Jl. Pinang, Jakarta Timur	17.429	m2

**Tahun 2019**

No	Lokasi	Alamat	Volume	Satuan
22	RTH Jl. Moh. Kahfi I, Gg. Oanjang 13-H, Jakarta Selatan	Jl. Moh. Kahfi I, Gg. Oanjang 13-H, Jakarta Selatan	9.275	m2
23	RTH Kamal	Jl. Sahabat Kampung Belakang RT 001/ 03, Kamal, Kalideres, Jakarta Barat	6.595	m2
24	RTH Puri Gardenia 2	RT 007/001 Kel. Pegadungan Kec. Kalideres, Jakarta Barat	2.740	m2
25	Taman Pakis	Jl. Pakis Raya RW 07 Kel. Rawa Buaya, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat	1.548	m2
26	Taman Masjid Al Amanah	Kel. Wijayakusuma, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat	1.817	m2
27	RTH Kedoya Utara	Jl. Raya Blok M Komplek Green Garden RW 010, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat	7.388	m2
28	RTH Kebagusan Raya RW.05	RTH Jl. Wika, RT.011 dan RT 004 RW.06, Kel. Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan	996	m2
29	RTH Jagakarsa II	Jl. Jagakarsa II Gg. H. Masmun RT01/RW07. Kel. Jagakarsa, Jakarta Selatan	2.218	m2
30	RTH M. Kahfi II	Jl. M. Kahfi II RT.06 RW.05, Kel. Srengseng Sawah, Jakarta Selatan	2.914	m2
31	RTH Jl. Menteng	Jl. Menteng RT 007 RW 006 Kel. Lenteng Agung, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan	1.583	m2
32	RTH Gintung	Jl. Gintung Tanjung Barat RT 011 RW 02 Kel. Tanjung Barat, Jakarta Selatan	1.704	m2

**Tahun 2019**

No	Lokasi	Alamat	Volume	Satuan
33	RTH Camat Gabun	Jl. Camat Gabun II No. 67 RT 003 RW 08 Kel. Lenteng Agung, Jakarta Selatan	5.012	m2
34	RTH Manunggal II	Jl. Manunggal II Komp. Kodam Jaya Belakang Gereja HKBP, Kel Cipinang Melayu, Kec. Makassar, Jakarta Timur	1.560	m2
35	RTH Bambu Apus	RT 010 RW 01, Kel Bambu Apus, Kec. Cipayung, Jakarta Timur	6.140	m2
36	RTH Sepakat	Jl. Sepakat RT.004 RW.010, Kel. Kelapa Dua Wetan, Kec. Ciracas, Jakarta Timur	1.637	m2
37	RTH PPA Depsos	Jl. PPA Depsos RT 003 RW 01 Kel. Bambu Apus, Kec. Cipayung, Jakarta Timur	3.104	m2
38	RTH Pondok Kelapa	RT 008 RW 05, Kel. Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur	2.492	m2
39	RTH Jl. PPA Depsos (lanjutan)	Jl. PPA Depsos No. 26 RT 005 RW 01, Kel. Bambu Apus, Kec. Cipayung, Jakarta Timur	1.290	m2
40	RTH Jl. Mesjid Al-Umar RT 004	Jl. Mesjid Al-Umar RT 004 RW 012, Kel. Lubang Buaya, Kec. Cipayung, Jakarta Timur	3.145	m2
41	RTH Jl. Mesjid Al-Umar 2	Jl. Mesjid Al-Umar 2, Kel. Lubang Buaya, Kec. Cipayung, Jakarta Timur	4.450	m2
42	RTH Lapangan Tembak	Jl. Lapangan Tembak RT 010 RW 002, Kel. Cibubur, Kec. Ciracas, Jakarta Timur	3.841	m2
43	RTH Bintaro	Taman Bintaro, Kel. Rorotan, Kec. Cilincing, Jakarta Utara	6.298	m2

Tahun 2019				
No	Lokasi	Alamat	Volume	Satuan
44	RTH Bahariwan	Jl. Bahariwan, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara	1.733	m2
45	RTH Gorontalo	Taman Gorontalo, Kel. Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara	4.051	m2
46	RTH Palem	Taman Palem, Kel. Tugu Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara	1.060	m2
47	RTH RW 08	Taman RW 08, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara	1.743	m2
48	Taman Maramba	Taman Maramba, Kel. Pegangsaan Dua, Jakarta Utara	1.782	m2
<b>Total 2019</b>			<b>296.112,77</b>	<b>m2</b>

Tahun 2020				
No	Lokasi	Alamat	Volume	Satuan
1	Tidak Ada Pembangunan			
<b>Total 2020</b>			<b>0</b>	<b>m2</b>

**Tahun 2021**

No	Lokasi	Alamat	Volume	Satuan
1	Taman Pejatian	Jl. Pasar Minggu No. 8 / 33A, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan	3.484	m2
2	Taman Samin Neong	Jl. Tol Lingkar Luar (TB Simatupang) Kel. Susukan, Kec. Ciracas, Jakarta Timur	1.394	m2
3	Taman Gentara	Jl. H. Raya No.7 A RT 005 RW 010, Jakarta Selatan	3.011	m2
4	Taman Lingkar Putri Hijau	Jl. Lingkar Puteri Hijau No. 21 RT 010 RW 005, Jakarta Selatan	1.362	m2
5	Taman Sambas Asri	Jl. Panglima Polim Raya, Kel. Kramat Pela, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan	1.337	m2
6	Taman Waru Timbul	Jl. Waru, Kel. Kebagusan, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan	545	m2
7	Taman Oasis	Jl. Daan Mogot No 14 dan 15 RT 006 RW 001 Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan, Jakarta Barat	1.240	m2
8	Taman Pulir	Jl. Duri Kosambi (Pulo Indah Raya) RT 001 RW 008 Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat	5.672	m2
9	Taman Indah Bersama	Jl. Kampung Rawa RT. 003 RW. 03, Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara	2.435	m2
10	Taman KP Muka	Jl RE Martadinata I RT. 007 RW. 04, Kel. Ancol, Kec. Pademangan, Jakarta Utara	1.396	m2
11	Taman Humaniora	Jl. Raya Lingkar Selatan RT 002 RW 04 Kel. Rambutan Kec. Ciracas, Jakarta Timur	1.919	m2

Tahun 2021				
No	Lokasi	Alamat	Volume	Satuan
12	Taman Simpang UKU	Jl. Utan Kayu Raya No. 68 RT 012 RW 05 Kel. Utan Kayu Utara Kec. Matraman, Jakarta Timur	1.000	m2
<b>Total 2021</b>			<b>24.796</b>	<b>m2</b>
<b>Grand Total</b>			<b>360,100</b>	<b>m2</b>

(Sumber : Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, 2021)



Gambar 5. Foto Taman Maju Bersama

Adapun target dan capaian kinerja pada periode sebelumnya tahun 2018-2021 dapat dilihat didalam tabel dibawah ini :

Tabel 6. Capaian Kinerja Tahun 2018-2021

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET CAPAIAN PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN										KONDISI KINERJA AKHIR TAHUN 2021	CAPAIAN (%)	
					2018		2019		2020		2021		2022				
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
Program Peningkatan Pelayanan Pemakaman	Indeks kepuasan masyarakat pelayanan pemakaman		80%	87%	80%	0	82%	87.2%	83%	89.41%	85%	90%	87%		90%	113%	
		Jenis sarana prasarana pelayanan pemakaman yang tersedia	-	6 jenis	0	0	6 jenis	11 jenis	6 jenis	1 jenis	6 jenis	4 jenis	6 jenis		4 jenis	67%	
		Jumlah petugas pengangkutan dan pemulasaraan jenazah terlantar	48 orang	48 orang	0	0	48 orang	48 orang		48 orang	100%						
		Jumlah orang yang mengikuti pelatihan keterampilan di bidang pemakaman	400 orang	1600 orang	0	0	400 orang	400 orang	400 orang	200 orang	400 orang	0	400 orang		600 orang	38%	
Program Pengelolaan Pemakaman	Indeks kepuasan masyarakat		80%	87%	80%	85.4%	0	0	0	0	0	0	0		85.4%	98%	
		Jumlah RTH makam yang ditata	-	7 lokasi	7 lokasi	11 lokasi	0	0	0	0	0	0	0		11 lokasi	157%	
		Jenis sarana prasarana pelayanan pemakaman yang tersedia	-	6 jenis	6 jenis	24 jenis	0	0	0	0	0	0	0		24 jenis	400%	
		Jumlah petugas pengangkutan dan pemulasaraan jenazah terlantar	48 orang	48 orang	48 orang	48 orang	0	0	0	0	0	0	0		48 orang	100%	
		Jumlah orang yang mengikuti pelatihan keterampilan di bidang pemakaman	400 orang	150 orang	150 orang	150 orang	0	0	0	0	0	0	0		150 orang	100%	
		Jumlah petugas pengamanan RTH makam	-	315 orang	315 orang	315 orang	0	0	0	0	0	0	0		315 orang	100%	
		Jumlah RTH makam yang dipelihara	-	82 lokasi	82 lokasi	82 lokasi	0	0	0	0	0	0	0		82 lokasi	100%	
Program Konservasi Flora dan Fauna	Penambahan jumlah fauna yang dikonservasi		2132 fauna	2182 fauna	0	0	2152 fauna	2286 fauna	2162 fauna	2296 fauna	2172 fauna	2298 fauna	2182 fauna		2298 fauna	105%	
		Pengadaan Makanan Satwa TMR	12 bulan	48 bulan	0	0	12 bulan		36 bulan	75%							
		Pengadaan Obat Satwa	12 bulan	48 bulan	0	0	12 bulan	12 bulan	12 bulan	0	12 bulan	0	12 bulan		12 bulan	25%	
		Penyusunan Master Plan TMR	0	5 dokumen	0	0	0	0	5 dokumen	0	0	0	0		0 dokumen	0%	
		Belanja Operasional Badan Layanan Umum TMR	-	4 tahun	0	0	1 tahun		3 tahun	75%							

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET CAPAIAN PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN										KONDISI KINERJA AKHIR TAHUN 2021	CAPAIAN (%)
					2018		2019		2020		2021		2022			
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		Pengadaan Pakaian Kerja dan Kelengkapan TMR	17 jenis	17 jenis	0	0	17 jenis	17 jenis	17 jenis	0	17 jenis	7 Jenis	17 jenis		6 jenis	35%
		Penataan Sarana dan Prasarana TMR	-	402.174 m2	0	0	218.708 m2	218.708 m2	94.661 m2	0	69.895 m2	0	18.910 m2		218.708 m2	54%
		Pembangunan Sarana dan Prasarana TMR	-	17.336,75 m2	0	0	2.925 m2	2.925 m2	4.637,75 m2	0	3.900 m2	0	5.874 m2		2.925 m2	17%
		Pengamanan dan Pelayanan Pengunjung TMR	-	187 orang	0	0	187 orang		187 orang	100%						
		Perencanaan Pembangunan dan Penataan Sarana Prasarana TMR	-	45 dokumen	0	0	42 dokumen	42 dokumen	0	0	3 dokumen	0	0		42 dokumen	93%
	Penambahan jumlah flora yang dikonservasi		52.733 flora	52.833 flora	0	0	52.773 flora	64.814 flora	52.793 flora	64.994 flora	52.813 flora	64.893 flora	52.833 flora		64.893 flora	123%
	Jumlah PHL Pemeliharaan untuk Perbaikan Sarana Prasarana, Penyiraman dan Pengangkutan		266 orang	296 orang	0	0	296 orang		296 orang	100%						
Program Konservasi Satwa	Penambahan jumlah satwa yang dikonservasi		2132 fauna	2.142 satwa	2.142 satwa	2.171 satwa	0	0	0	0	0	0	0		2.171 satwa	101%
		Pengadaan Makanan Satwa TMR per tahun	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	0	0	0	0	0	0	0		12 bulan	100%
		Pengadaan Obat Satwa per tahun	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	0	0	0	0	0	0	0		12 bulan	100%
		Luas sarana dan prasarana TMR yang tertata	0	37.212,467 m2	37.212,467 m2	16.723 m2	0	0	0	0	0	0	0		16.723 m2	45%
		Luas sarana dan prasarana TMR yang terbangun	0	2.277,75 m2	2.277,75 m2	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0%
		Belanja Operasional Badan Layanan Umum TMR per tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	0	0	0	0	0	0	0		1 tahun	100%
Program Pengelolaan Hutan	Penambahan Rasio RTH Hutan		0,024%	0.079%	0.0085%	0.026%	0.0115%	0.0029%	0.0115%	0%	0.0115%	0%	0.0115%		0.053%	67%
		Pengadaan Tanah untuk RTH Hutan	15,8 Ha	51,36 Ha	5,56 Ha	16,7 Ha	7,5 Ha	1,86 Ha	7,5 Ha	0	7,5 Ha	0	7,5 Ha		34,36 Ha	67%
		Pembangunan RTH Hutan	0	15 Ha	3 Ha	9,6 Ha	3 Ha	1,06 Ha	3 Ha	0	3 Ha	0	3 Ha		10,66 Ha	71%
		Pembangunan Lampu Hutan	0	160 titik	0	0	40 titik	30 titik	40 titik	0	40 titik	0	40 titik		30 titik	19%
		Pembangunan Pagar RTH Hutan	2.295 m'	7.295 m'	1.000 m'	1680 m'	1.000 m'	1380 m'	1.000 m'	0	1.000 m'	0	1.000 m'		5355 m'	73%
		Perencanaan Ruang Terbuka Hijau Hutan	-	-	0		0		0	8 dokumen	0	0	0		8 dokumen	-

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET CAPAIAN PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN										KONDISI KINERJA AKHIR TAHUN 2021	CAPAIAN (%)
					2018		2019		2020		2021		2022			
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		Pembayaran Hutang Daerah RTH Hutan	-	-	0		0		0		0	2 lokasi	0		2 lokasi	-
	Persentase lokasi RTH Hutan yang terpelihara		93%	97%	95%	100%	95%	100%	96%	100%	97%	100%	97%		100%	103%
		Jumlah lokasi RTH hutan yang dipelihara	41 lokasi	77 lokasi	57 lokasi	35 lokasi	62 lokasi	35 lokasi	67 lokasi	52 lokasi	72 lokasi	55 lokasi	77 lokasi		55 lokasi	71%
		Jumlah lokasi RTH hutan yang ditata	3 lokasi	29 lokasi	5 lokasi	25 lokasi	5 lokasi	2 lokasi	5 lokasi	2 lokasi	6 lokasi	0	5 lokasi		32 lokasi	110%
		Jumlah personel pengamanan RTH hutan	-	201 orang	131 orang	131 orang	152 orang	0	167 orang	0	183 orang	125 orang	201 orang		125 orang	62%
		Jumlah personel polisi kehutanan yang ikut peningkatan kapasitas	-	125 orang	25 orang	25 orang	25 orang	25 orang	25 orang	0	25 orang	0	25 orang		50 orang	40%
		Jumlah masyarakat yang terbina melalui kegiatan Saka Wana Bhakti	-	2500 orang	500 orang	700 orang	500 orang	1011 orang	500 orang	430 orang	500 orang	0	500 orang		2141 orang	86%
		Jumlah penyelenggaraan kegiatan operasi pengendalian tumbuhan dan satwa liar	-	20 kali	4 kali	3 kali	4 kali	10 kali	4 kali	5 kali	4 kali	0	4 kali		18 kali	90%
		Jumlah penyelenggaraan kegiatan pengawasan dan peredaran hasil hutan	-	50 kali	10 kali	0	10 kali	4 kali	10 kali	0	10 kali	0	10 kali		4 kali	8%
		Jumlah dokumen kebijakan di Bidang Kehutanan yang tersusun	-	1 dokumen	0	0	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen		1 dokumen	100%
		Jumlah kasus yang tertangani dan terselesaikan	-	20 kasus	0	21	20 kasus	0	20 kasus	0	20 kasus	0	20 kasus		21 kasus	105%
Program Pengelolaan Pertamanan	Penambahan Rasio RTH Taman		0,139%	0.259%	0.044%	0.039%	0.019%	0.0257%	0.019%	0.0295%	0.019%	0.0212%	0.019%		0.254%	98%
		Luas lahan yang dibebaskan untuk RTH taman	90,61 Ha	169,5 Ha	28,89 Ha	25,6 Ha	12,5 Ha	16,8 Ha	12,5 Ha	19,27 Ha	12,5 Ha	13,88 Ha	12,5 Ha		166,2 Ha	98%
		Luas RTH taman yang terbangun	2.134,17 Ha	2.230,74 Ha	8,57 Ha	3,92 Ha	22 Ha	21,5 Ha	22 Ha	0	22 Ha	2,04 Ha	22 Ha		2161,63 Ha	97%
		Luas RTH taman jalur hijau yang terbangun	6,68 Ha	18,68 Ha	0	0	3	8	3	0	3	0,44 Ha	3		15,12 Ha	81%
		Luas RTH kebun bibit yang terbangun	-	4 Ha	0	0	1	5.2	1	0	1	0	1		5,2 Ha	130%
		Jumlah titik lampu yang terbangun di RTH taman	-	3.201 titik	641 titik	602 titik	640 titik	200 titik	640 titik	0	640 titik	0	640 titik		802 titik	25%

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET CAPAIAN PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN										KONDISI KINERJA AKHIR TAHUN 2021	CAPAIAN (%)
					2018		2019		2020		2021		2022			
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		Panjang pagar RTH taman yang terbangun	-	6.000 m'	1.200 m'	639 m'	1.200 m'	0	1.200 m'	0	1.200 m'	0	1.200 m'		639 m'	11%
		Panjang pagar RTH taman jalur hijau yang terbangun	-	8.000 m'	0	0	2.000 m'	2215 m'	2.000 m'	0	2.000 m'	0	2.000 m'		2215 m'	28%
		Jumlah unit ornamen dan sarana keindahan kota di RTH Taman yang terbangun	-	8 unit	0	0	2 unit	2 unit	2 unit	0	2 unit	0	2 unit		2 unit	25%
		Jumlah lokasi air mancur yang terbangun di wilayah DKI Jakarta	-	2 unit	2 unit	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0%
		Jumlah lokasi sarana penyiraman yang terbangun di wilayah DKI Jakarta	-	7 unit	7 unit	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0%
		Jumlah dokumen perencanaan RTH taman yang tersusun	-	-	-	-	40 dokumen	-	0	-	0	-		40 dokumen	-	
		Jumlah dokumen perencanaan RTH taman jalur hijau yang tersusun	-	-	-	-	10 dokumen	-	0	-	0	-		10 dokumen	-	
		Jumlah lokasi yang terbayarkan hutang daerahnya	-	-	-	-	22 lokasi	-	-	-	15 lokasi	-		37 lokasi	-	
	Persentase lokasi RTH Taman yang terpelihara		99%	99%	99%	100%	99%	100%	99%	100%	99%	100%	99%	100%	101%	
		Persentase RTH taman yang terpelihara	99%	594%	99%	100%	99%	100%	99%	100%	99%	100%	99%	499%	84%	
		Persentase RTH taman jalur hijau yang terpelihara	99%	594%	0	0	99%	100%	99%	100%	99%	100%	99%	499%	84%	
		Jumlah RTH kebun bibit yang terpelihara	6 lokasi	10 lokasi	6 lokasi	6 lokasi	7 lokasi	8 lokasi	8 lokasi	8 lokasi	9 lokasi	8 lokasi	10 lokasi	8 lokasi	80%	
		Jumlah RTH taman yang ditata	-	206 lokasi	26 lokasi	84 lokasi	45 lokasi	174 lokasi	45 lokasi	35 lokasi	45 lokasi	1 lokasi	45 lokasi	294 lokasi	143%	
		Jumlah RTH taman jalur hijau yang tertata	-	60 lokasi	0	0	12 lokasi	132 lokasi	15 lokasi	22 lokasi	16 lokasi	0	17 lokasi	154 lokasi	257%	
		Luas RTH kebun bibit yang tertata	11,24 Ha	89,55 Ha	17,91 Ha	0	17,91 Ha	8,5 Ha	17,91 Ha	0	17,91 Ha	0	17,91 Ha	8,5 Ha	9%	
		Jenis sarana dan prasarana kebun bibit yang diadakan	29 jenis	26 jenis	26 jenis	35 jenis	0	0	0	0	0	0	0	35 jenis	135%	
		Pemeliharaan Ornamen dan Sarana Keindahan Kota per tahun	0	5 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	4 tahun	80%	

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET CAPAIAN PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN										KONDISI KINERJA AKHIR TAHUN 2021	CAPAIAN (%)
					2018		2019		2020		2021		2022			
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		Jumlah titik lampu yang terpelihara	5.407 titik	43.986 titik	0	0	6.996 titik	6015 titik	7.716 titik	8300 titik	8.436 titik	2.109 titik	9.156 titik		21.831 titik	50%
		Jenis Tanaman dan Bahan Dekorasi yang diadakan	72 jenis	421 jenis	85 jenis	112 jenis	81 jenis	193 jenis	81 jenis	0	87 jenis	0	87 jenis		305 jenis	72%
		Jumlah lokasi pemeliharaan tanaman dekorasi	65 lokasi	65 lokasi	0	0	65 lokasi	0	65 lokasi	0	65 lokasi	0	65 lokasi		0 lokasi	0%
		Jumlah penyelenggaraan acara-acara kedinasan	3 kali	3 kali	3 kali	2 kali	3 kali	3 kali	3 kali	2 kali	3 kali	2 kali	3 kali		3 kali	100%
		Jumlah klaim santunan asuransi yang terbayarkan akibat bencana pohon tumbang	289 klaim	489 klaim	40 klaim	35 klaim	40 klaim	40 klaim	40 klaim	40 klaim	40 klaim	46 Klaim	40 klaim		450 klaim	92%
		Jumlah personel pengamanan RTH Taman	0	508 orang	355 orang	355 orang	382 orang	0	420 orang	0	462 orang	615 orang	508 orang		615 orang	121%
		Jumlah kasus RTH taman yang tertangani dan terselesaikan	0	10 kasus	10 kasus	3 kasus	0	0	0	0	0	0	0		3 kasus	30%
		Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan pertamanan	341 orang	3.541 orang	0	0	800 orang	800 orang	800 orang	0	800 orang	0	800 orang		1141 orang	32%
		Jumlah masyarakat yang diberdayakan oleh Dinas Kehutanan	741 orang	2.000 orang	0	0	500 orang	0	500 orang	0	500 orang	0	500 orang		0 orang	0%
		Jumlah kegiatan Penggalangan Kemitraan dan Kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan	0	44 kali	0	0	11 kali	11 kali	11 kali	0	11 kali	0	11 kali		11 kali	275%
		Jenis media publikasi Dinas Kehutanan yang dibuat	0	5 jenis	0	0	6 jenis	0	5 jenis	1 jenis	5 jenis	4 Jenis	5 jenis		5 jenis	100%
		Jumlah petugas Patroli Pengawasan Taman, Jalur Hijau, Hutan Kota, dan TPU di Wilayah DKI Jakarta	0	36 orang	36 orang	36 orang	0	0	0	0	0	0	0		36 orang	100%
		Jumlah lokasi kegiatan yang terbayarkan hutang daerahnya	0	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	0	0	0	0	0	0	0		1 lokasi	100%
		Jumlah dokumen Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta yang tersusun	0	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0	0	0	0	0	0	0		1 dokumen	100%
		Jenis Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau yang diadakan	0	10 jenis	10 jenis	25 jenis	0	0	0	0	0	0	0		25 jenis	250%

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET CAPAIAN PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN										KONDISI KINERJA AKHIR TAHUN 2021	CAPAIAN (%)
					2018		2019		2020		2021		2022			
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		Jumlah dokumen kebijakan Dinas Kehutanan yang tersusun	-	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	0	0	1 dokumen	0	4 dokumen	133%	
		Jumlah unit elemen tata hias kota yang tertata	-	7 unit	0	0	7 unit	0	0	0	0	0	0	0	0%	
		Jumlah dokumen kebijakan di Bidang Pertamanan yang tersusun	-	4 dokumen	0	0	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	1 dokumen	25%	
Program Pengelolaan Pemakaman	Penambahan Rasio RTH Makam		0,013%	0.045%	0.014%	0.007%	0.0046%	0.0042%	0.0046%	0.0052%	0.0046%	0.00%	0.0046%	0.029%	64%	
		Luas lahan untuk RTH makam yang dibebaskan	8,41 Ha	29,3 Ha	8,89 Ha	4,8 Ha	3 Ha	2,77 Ha	3 Ha	3,3679 Ha	3 Ha	0	3 Ha	19,35 Ha	66%	
		Luas RTH makam yang dibangun	1,95 Ha	46,61 Ha	0	0	11,09 Ha	3,8 Ha	11,14 Ha	0	11,19 Ha	1,605 Ha	11,24 Ha	5,405 Ha	12%	
		Jumlah titik lampu yang terbangun di RTH makam	0	240 titik	80 titik	0	40 titik	35 titik	40 titik	0	40 titik	0	40 titik	35 titik	15%	
		Panjang pagar RTH makam yang terbangun	0	12.325 m'	4.325 m'	4495,5 m'	2.000 m'	4369 m'	2.000 m'	0	2.000 m'	0	2.000 m'	8864,5 m'	72%	
		Jumlah dokumen perencanaan RTH makam yang tersusun	-	-	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	2 dokumen	-	4 dokumen	-	
		Jumlah lokasi yang terbayarkan hutang daerahnya	-	-	-	-	-	4 lokasi	-	-	-	2 lokasi	-	6 lokasi	-	
	Persentase lokasi RTH Makam yang terpelihara		83%	91%	0%	0	89%	100%	90%	100%	90%	100%	91%	100%	110%	
		Jumlah RTH makam yang terpelihara	0	82 lokasi	0	0	82 lokasi	82 lokasi	82 lokasi	73 lokasi	82 lokasi	73 lokasi	82 lokasi	73 lokasi	89%	
		Jumlah RTH makam yang ditata	0	71 lokasi	0	0	20 lokasi	73 lokasi	16 lokasi	4 lokasi	17 lokasi	3 lokasi	18 lokasi	80 lokasi	113%	
Jumlah personel pengamanan RTH makam		0	478 orang	0	0	360 orang	0	396 orang	0	435 orang	0	478 orang	0	0%		
	Jumlah dokumen kebijakan di Bidang Pemakaman yang tersusun	0	1 dokumen	0	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	0%		
Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kehutanan	Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor		4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3.5	88%	
		Penyediaan jasa telepon, air, listrik dan internet (TALI) per tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100%

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET CAPAIAN PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN										KONDISI KINERJA AKHIR TAHUN 2021	CAPAIAN (%)
					2018		2019		2020		2021		2022			
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Kebersihan Kantor per tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100%
		Jenis alat tulis kantor yang tersedia per tahun	-	43 jenis	43 jenis	178 jenis	43 jenis	246 jenis	43 jenis	139 jenis	43 jenis	134 jenis	43 jenis		174 jenis	405%
		Jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia per tahun	-	14 jenis	14 jenis	56 jenis	14 jenis	56 jenis	14 jenis	45 jenis	14 jenis	48 jenis	14 jenis		51 jenis	364%
		Jumlah unit mesin fotokopi yang disewa per tahun	-	8 unit	8 unit	8 unit	8 unit	13 unit	8 unit	14 unit	8 unit	11 unit	8 unit		12 unit	150%
		Jenis peralatan dan perlengkapan kerja kantor yang disediakan per tahun	-	53 jenis	53 jenis	36 jenis	53 jenis	125 jenis	53 jenis	24 jenis	53 jenis	10 jenis	53 jenis		49 jenis	92%
		Penyediaan makanan dan minuman per tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun		1 tahun	100%
		Jenis jasa administrasi keuangan yang disediakan per tahun	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	3 jenis	2 jenis	7 jenis	2 jenis		4 jenis	200%
		Jumlah PHL pemeliharaan untuk perbaikan sarana prasarana, penyiraman dan pengangkutan	-	600 orang	600 orang	766 orang	600 orang	447 orang	600 orang	570 orang	600 orang	441 orang	600 orang		556 orang	93%
		Jenis bahan bangunan yang tersedia untuk perbaikan sarana dan prasarana gedung Dinas Kehutanan	-	47 jenis	47 jenis	74 jenis	47 jenis	60 jenis	47 jenis	1 jenis	47 jenis	205 jenis	47 jenis		85 jenis	181%
		Jumlah PHL bidang teknis yang didayagunakan	-	204 orang	204 orang	154 orang	0	0	0	0	0	0	0		154 orang	75%
		Jumlah personel Pengamanan Gedung Kantor, Gudang Barang, Bengkel Pool Kendaraan, Sarana Keindahan Kota, Area Buper Ragunan dan Kebun Bibit Dinas Kehutanan	-	151 orang	105 orang	105 orang	115 orang	36 orang	126 orang	90 orang	138 orang	96 orang	151 orang		96 orang	64%
		Luas lahan aset Dinas Kehutanan yang tersertifikasi	-	100 Ha	20 Ha	0	20 Ha	0	20 Ha	0	20 Ha	0	20 Ha		0	0%
		Jumlah lokasi sarana prasarana gedung kantor dan aset Dinas Kehutanan yang tertata	-	12 lokasi	4 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	0	2 lokasi	1 lokasi	2 lokasi	0	2 lokasi		3 lokasi	25%

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET CAPAIAN PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN										KONDISI KINERJA AKHIR TAHUN 2021	CAPAIAN (%)
					2018		2019		2020		2021		2022			
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		Jenis pakaian kerja dan kelengkapan perawatan RTH yang diadakan	-	15 jenis	15 jenis	71 jenis	0	0	0	0	0	0	0	0	71 jenis	473%
		Jenis peralatan dan perlengkapan kerja perawatan taman dan makam yang diadakan	-	103 jenis	103 jenis	222 jenis	0	0	0	0	0	0	0	0	222 jenis	216%
		Jenis peralatan dan perlengkapan kerja yang terpelihara	-	18 jenis	18 jenis	19 jenis	0	0	0	3 jenis	0	28 jenis	0	0	50 jenis	278%
		Jumlah Petugas Pemeliharaan untuk Perbaikan Sarana Prasarana, Penyiraman dan Pengangkutan	-	266 orang	266 orang	266 orang	0	0	0	0	0	0	0	0	266 orang	100%
		Jumlah personel Pengamanan Kawasan TMR	-	100 orang	100 orang	100 orang	0	0	0	0	0	0	0	0	100 orang	100%
		Jumlah Petugas Loket Pelayanan Pengunjung TMR	-	32 orang	32 orang	32 orang	0	0	0	0	0	0	0	0	32 orang	100%
		Jenis Pengadaan Pakaian Kerja dan Kelengkapan TMR yang disediakan	-	17 jenis	17 jenis	14 jenis	0	0	0	0	0	0	0	0	14 jenis	82%
		Jumlah PHL teknis yang tersedia	-	204 orang	0	0	204 orang	51 orang	204 orang	95 orang	204 orang	95 orang	204 orang	0	95 orang	47%
Program Peningkatan dan Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Kehutanan	Indeks Kepuasan Pelayanan Kendaraan Operasional		3	3	3	4	3	4	3	4	3	4	3	0	4	133%
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Khusus yang diadakan	-	245 unit	57 unit	153 unit	39 unit	153 unit	47 unit	0	46 unit	6 unit	56 unit	0	312 unit	127%
		Jumlah BBM KDO/ KDO Khusus yang tersedia per tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 Tahun	1 tahun	0	1 tahun	100%
		Penyediaan BBM Peralatan Kerja per tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 Tahun	1 tahun	0	1 tahun	100%
		Jumlah unit KDO/KDO khusus yang terurus perizinannya	-	570 unit	570 unit	376 unit	570 unit	587 unit	570 unit	688 unit	570 unit	1.120 unit	570 unit	0	693 unit	122%
		Jumlah kendaraan dinas operasional yang diperbaiki secara rutin/berkala per tahun	1 tahun	5 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 Tahun	1 tahun	0	4 tahun	80%
		Jumlah unit kendaraan yang menggunakan Jasa tol KDO khusus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102 unit	-	0	102 unit	-

Dari tabel diatas dapat dilihat dan disimpulkan bahwa masih banyak indikator kinerja Dinas Pertamanan dan Hutan Kota yang belum tercapai dikarenakan :

1. Terjadinya pandemi Covid-19 sejak tahun 2020 memberikan dampak besar pada perekonomian termasuk salah satunya menurunnya pendapatan asli daerah dan kontraksi pada APBD sehingga mengakibatkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus melakukan penyesuaian target kinerja dan anggaran disesuaikan dengan kemampuan APBD pada saat itu. Kebijakan refocusing anggaran mengakibatkan banyak kegiatan yang tidak terlaksana karena kegiatan lebih diprioritaskan untuk kebutuhan yang mendesak saat itu dan memaksimalkan penggunaan sumber daya yang sudah tersedia dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini tentunya berdampak kepada target kinerja yang semula sudah direncanakan tidak bisa mencapai hasil yang optimal.
2. Terdapat beberapa kegiatan dan program yang terlaksana hanya di tahun 2018 saja karena mengalami perubahan nomenklatur di tahun selanjutnya. Perubahan tersebut disesuaikan dengan Peraturan Kemendagri No. 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
3. Terdapat beberapa nomenklatur kegiatan baru yang berjalan pada pertengahan tahun perencanaan, menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pada saat itu sehingga untuk capaiannya tidak bisa dihitung karena tidak ada data target capaian pada akhir tahun perencanaan.
4. Arah kebijakan pimpinan daerah terutama dalam hal pengendalian banjir yaitu memaksimalkan fungsi RTH dalam integrasi dengan jejaring hijau-biru.

### 2.3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi atau serapan anggaran yang dicapai oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota mengindikasikan berjalannya program yang sudah disusun oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota. Realisasi anggaran Dinas Pertamanan dan Hutan Kota selama empat tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 6 dibawah ini:

Tabel 7. Realisasi Anggaran Tahun 2018-2021

Tahun	APBD Awal Tahun	APBD-Perubahan	Realisasi	Capaian
2018	2.717.258.483.394	3.198.679.802.665	2.941.059.076.988	91,95%
2019	2.337.992.648.027	3.140.935.187.606	2.348.676.717.992	74,78%
2020	2.789.824.884.150	920.404.645.257	861.856.453.185	93,64%
2021	1.381.517.082.476	1.323.899.227.238	1.269.419.847.184	95,88%

(Sumber : Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, 2021)

Penyerapan anggaran Dinas Pertamanan dan Hutan Kota sebagian besar berada di angka 90% ke atas, namun di tahun 2019 merupakan angka penyerapan anggaran terendah menyentuh angka 74,78% saja. Rendahnya penyerapan di tahun 2019 akibat adanya kebijakan Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 100 Tahun 2019 tentang Efisiensi Belanja TA 2019 untuk beberapa jenis belanja serta menginstruksikan BPPBJ untuk tidak melakukan lelang ulang atas kegiatan yang telah gagal lelang dan menghentikan proses lelang pengadaan atas kegiatan yang dianggarkan di APBD-P TA 2019. Oleh karena pengadaan lahan masuk dalam jenis belanja yang terkena efisiensi, maka serapan anggaran dalam pengadaan tanah hanya mencapai angka 74% saja, padahal anggaran pengadaan lahan masih mendominasi dalam pagu anggaran Dinas Pertamanan dan Hutan Kota pada saat itu.

#### 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota dapat dilakukan dengan melihat pencapaian target kinerja dan realisasi penyerapan anggaran Dinas Pertamanan dan Hutan Kota dari tahun 2018 sampai dengan 2021, metode yang bisa digunakan untuk melihat tantangan dan peluang adalah menggunakan metode SWOT dengan melakukan analisa baik lingkungan internal maupun eksternal.

Analisis lingkungan internal pada dasarnya proses identifikasi yang menguraikan kekuatan dan kelemahan yang meliputi struktur organisasi, sumber daya manusia, pembiayaan, sarana dan prasarana. Analisis Lingkungan Internal dikelompokkan atas hal-hal yang merupakan kelemahan (*weakness*) atau kekuatan (*strength*) organisasi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Sedangkan Analisis lingkungan eksternal pada dasarnya adalah identifikasi terhadap kondisi lingkungan luar organisasi yang menguraikan peluang dan tantangan/ancaman yang terdiri dari lingkungan ekonomi, teknologi, sosial budaya, politik, ekologi dan keamanan. Identifikasi ini akan menghasilkan indikasi mengenai

peluang (*opportunity*) dan tantangan (*threats*) organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

Tabel 8. Analisa Faktor Internal dan Eksternal Pengembangan Pelayanan

<b>FAKTOR INTERNAL</b>	
<p><b>Kekuatan (Strength)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Undang-Undang tentang Penataan Ruang</li> <li>2. Adanya Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang Rencana Tata Ruang Wilayah</li> <li>3. Infrastruktur kota yang cukup memadai untuk menunjang minat investor</li> <li>4. Adanya komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui pemulihan ekosistem kota</li> <li>5. Adanya Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Taman serta Pengelolaan dan Perlindungan Pohon</li> </ol>	<p><b>Kelemahan (Weakness)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rancangan Peraturan Gubernur tentang Ruang Terbuka Hijau belum disahkan</li> <li>2. Beberapa peraturan dan SOP yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini</li> <li>3. Kualitas dan kuantitas SDM yang masih rendah</li> </ol>
<b>FAKTOR EKSTERNAL</b>	
<p><b>Peluang (Opportunities)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sudah tersusun rancangan Peraturan Gubernur tentang Ruang Terbuka Hijau</li> <li>2. Tingginya kebutuhan masyarakat akan penyediaan ruang terbuka hijau sebagai sarana rekreasi dan edukasi dengan tetap mengutamakan fungsi ekologisnya</li> <li>3. Kemampuan finansial pihak swasta untuk ikut serta dalam pembangunan dan penyediaan Ruang Terbuka Hijau</li> </ol>	<p><b>Ancaman (Threat)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pandemi Covid-19 yang berdampak pada segala sektor kehidupan termasuk tingginya angka kematian penduduk DKI Jakarta</li> <li>2. Permasalahan lingkungan (banjir, penurunan muka tanah, pencemaran udara, kelangkaan air tanah) yang masih sering terjadi</li> <li>3. Terbatasnya lahan untuk penambahan ruang terbuka hijau</li> <li>4. Tingginya harga tanah di wilayah Provinsi DKI Jakarta</li> </ol>

<p>4. Pemerintah dan masyarakat sebagai <i>co-creator</i> yang mengusung semangat kolaborasi membangun kota dengan mengutamakan prinsip perencanaan, partisipatif dan kerjasama pembangunan.</p> <p>5. Tersedianya <i>Integrated Transportation</i> (integrasi antar moda) dan TOD melalui penataan stasiun, jalur pejalan kaki dan jalur sepeda di DKI Jakarta</p> <p>6. Era digitalisasi ditandai dengan tersedianya beragam platform media sosial sebagai media informasi pelayanan publik</p>	<p>5. Rencana pemindahan ibukota negara</p>
---	---

Dari Analisa S-W-O-T yang dilakukan maka tantangan dan peluang dalam Pengembangan Pelayanan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota dapat dilihat dari *threat* dan *opportunities* yang telah diuraikan meliputi:

a. Tantangan:

1. Sudah tersusun rancangan Peraturan Gubernur tentang Ruang Terbuka Hijau
2. Tingginya kebutuhan masyarakat akan penyediaan ruang terbuka hijau sebagai sarana rekreasi dan edukasi dengan tetap mengutamakan fungsi ekologisnya
3. Kemampuan finansial pihak swasta untuk ikut serta dalam pembangunan dan penyediaan Ruang Terbuka Hijau
4. Pemerintah dan masyarakat sebagai *co-creator* yang mengusung semangat kolaborasi membangun kota dengan mengutamakan prinsip perencanaan, partisipatif dan kerjasama pembangunan.
5. Tersedianya *Integrated Transportation* (integrasi antar moda) dan TOD melalui penataan stasiun, jalur pejalan kaki dan jalur sepeda di DKI Jakarta
6. Era digitalisasi ditandai dengan tersedianya beragam platform media sosial sebagai media informasi pelayanan publik

b. Peluang:

1. Pandemi Covid-19 yang berdampak pada segala sektor kehidupan termasuk tingginya angka kematian penduduk DKI Jakarta
2. Permasalahan lingkungan (banjir, penurunan muka tanah, pencemaran udara, kelangkaan air tanah) yang masih sering terjadi
3. Terbatasnya lahan untuk penambahan ruang terbuka hijau
4. Tingginya harga tanah di wilayah Provinsi DKI Jakarta
5. Rencana pemindahan ibukota negara



## BAB 3

### Permasalahan dan Isu-Isu Strategis

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Dari uraian tantangan dan peluang yang dimiliki oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sebetulnya dapat ditemukan berbagai permasalahan yang harus dipecahkan oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota. Beberapa permasalahan tersebut antara lain:

Tabel 9. Identifikasi Permasalahan

No	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
1	Arah kebijakan pengelolaan RTH berubah-ubah	Dokumen Masterplan Ruang Terbuka Hijau belum bisa menjadi rujukan karena belum disahkan	Peraturan Gubernur tentang Ruang Terbuka Hijau belum disahkan
2	Capaian rasio RTH yang rendah namun kebutuhan masyarakat akan ketersediaan ruang terbuka hijau tinggi	Pengadaan lahan untuk RTH terbatas disesuaikan dengan kemampuan APBD	Tingginya harga lahan di Provinsi DKI Jakarta
3	Terbatasnya lahan pemakaman di DKI Jakarta	Angka kematian penduduk DKI Jakarta yang tinggi serta lahan siap pakai yang terbatas	Pandemi Covid-19
4	Tata kelola organisasi yang belum optimal	Rendahnya kinerja aparatur	Penyediaan sarana prasarana pendukung operasional aparatur yang belum memadai

### 3.2 Telaahan RPJMN Tahun 2020-2024

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, terdapat 7 (tujuh) agenda pembangunan yaitu:

- 1) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
- 2) mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
- 3) meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
- 4) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
- 5) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
- 6) membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
- 7) memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Dari ketujuh agenda pembangunan tersebut, yang berkaitan dengan kinerja pelayanan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota adalah agenda keenam yaitu membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Adapun sasaran dari agenda pembangunan tersebut yang bisa dijadikan tolak ukur Renstra Dinas Pertamanan dan Hutan Kota dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sampai dengan akhir tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Kajian Telaahan RPJMN Disesuaikan dengan Tupoksi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota

No	Sasaran dari Agenda keenam RPJMN	Indikator	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
1.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut (IKTL)	Rendahnya peningkatan nilai IKTL di DKI Jakarta	Rendahnya luasan area tutupan lahan di DKI Jakarta karena keterbatasan lahan ruang terbuka hijau	Penambahan luasan Ruang Terbuka Hijau secara kontinu setiap tahunnya

No	Sasaran dari Agenda keenam RPJMN	Indikator	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
2.	Pemulihan lahan berkelanjutan	Luas tutupan hutan dan lahan ditingkatkan secara nasional	Rendahnya peningkatan luasan area tutupan hutan dan lahan di DKI Jakarta	Penambahan lahan hutan baru terbatas sesuai dengan kemampuan APBD	Rehabilitasi hutan dan lahan melalui kegiatan penataan dan penghijauan secara kontinu setiap tahunnya

### 3.3 Telaahan RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005-2025

Visi pembangunan jangka panjang daerah Provinsi DKI Jakarta untuk tahun 2005-2025 adalah "Jakarta: Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang aman, nyaman, sejahtera, produktif, berkelanjutan dan berdaya saing global". Dari visi tersebut kemudian dijabarkan ke dalam enam misi RPJPD yang antara lain:

1. meningkatkan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana wilayah
2. meningkatkan perekonomian yang kuat dan berkualitas
3. membangun ketahanan sosial dan budaya
4. meningkatkan daya dukung, daya tampung lingkungan dan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam
5. meningkatkan kapasitas dan kualitas pemerintahan
6. memperkuat inovasi dan kreativitas daerah

Dari keenam misi tersebut, yang berkaitan dengan kinerja pelayanan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota adalah misi keempat yaitu meningkatkan daya dukung, daya tampung dan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam. Selanjutnya dari misi tersebut, akan dilakukan telaahan arah kebijakan pembangunan yang sesuai dengan tupoksi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota.

Tabel 11. Kajian Telaahan RPJPD Provinsi DKI Jakarta Disesuaikan dengan Tupoksi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota

No	Arah Kebijakan Pembangunan dari Misi ke-4 RPJPD 2005-2025	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Mewujudkan peningkatan pengendalian daya dukung dan daya tampung lingkungan kota	RTH belum dapat difungsikan secara maksimal	Penambahan luasan RTH terbatas sesuai dengan kemampuan APBD	RTH memiliki peran penting dalam mengatasi permasalahan lingkungan seperti banjir, penurunan muka tanah, pencemaran udara dan kelangkaan air tanah serta memiliki fungsi sosial ekonomi dan kebudayaan sebagai tempat interaksi warga
2.	Mewujudkan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat Jakarta dalam menghadapi bencana	Rendahnya ketersediaan RTH di DKI Jakarta	Belum ada pedoman teknis RTH sebagai ruang mitigasi bencana	Potensi RTH sebagai ruang mitigasi bencana

### 3.4 Telaahan Renstra K/L

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024, Visi Kementerian LHK adalah "Terwujudnya keberlanjutan sumber daya hutan dan lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat". Sementara misi Renstra Kementerian LHK ada empat yaitu:

1. mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup berkualitas
2. mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan
3. mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara
4. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

Adapun sasaran strategis Renstra Kementerian LHK yang bisa dijadikan tolak ukur Renstra Dinas Pertamanan dan Hutan Kota dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sampai dengan akhir tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 12. Kajian Telaahan Renstra Kementerian LHK Disesuaikan dengan Tupoksi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota

No	Sasaran Strategis Renstra KLHK	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Terwujudnya Lingkungan Hidup dan Hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim	Rendahnya Indeks Kualitas Lahan di DKI Jakarta	Rendahnya luasan area tutupan lahan di DKI Jakarta karena keterbatasan lahan ruang terbuka hijau	Penambahan luasan Ruang Terbuka Hijau serta penataan secara kontinu setiap tahunnya
2.	Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Potensi terbesar hanya sebatas pada retribusi pengawasan peredaran hasil hutan	Kawasan hutan yang ada di Provinsi DKI Jakarta hanya sebatas sebagai pelindung kawasan pesisir dan penyerap karbon karena didominasi oleh tanaman mangrove	Komitmen dari pemerintah untuk pengembangan dan pengelolaan hasil hutan
3.	Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan	Jumlah kawasan hutan dengan status penetapan di DKI Jakarta baru untuk 14 lokasi dari total 39 lokasi	Terbatasnya luas RTH hutan	1. Penambahan luasan hutan kota baru dari hasil pengadaan lahan 2. Pendampingan Kelompok Tani Hutan dalam pemanfaatan RTH hutan
3.	Terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik serta kompetensi SDM LHK yang berdaya saing	Belum tersedianya SOP yang memadai	Keterbatasan sumber daya manusia	Komitmen dari pemerintah untuk pengembangan kompetensi SDM bidang kehutanan

### 3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No.1 Tahun 2012 tentang RTRW Provinsi DKI Jakarta 2030, untuk mendukung tujuan terwujudnya keterpaduan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di bawah permukaan tanah dan di bawah permukaan air dengan

mempertimbangkan kondisi kota Jakarta sebagai kota delta (delta city) dan daya dukung sumber daya alam serta daya tampung lingkungan hidup secara berkelanjutan maka langkah yang bisa dilakukan antara lain:

- a. Pelaksanaan konservasi kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan lindung, sumber daya air, dan pengembangan RTH untuk keseimbangan ekologi kota Jakarta;
- b. Pengembangan RTH untuk mencapai 30% (tiga puluh persen) dari luas daratan Provinsi DKI Jakarta terdiri dari RTH Publik dan RTH Privat yang didedikasikan sebagai RTH bersifat publik seluas 20% (dua puluh persen) dan RTH Privat seluas 10% (sepuluh persen) sebagai upaya peningkatan kualitas kehidupan kota.

Mengacu pada 2 (dua) langkah diatas, maka dapat dijadikan dasar penentuan aspek kajian sebagai bahan telaahan terkait tugas pokok dan fungsi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota seperti tabel dibawah ini :

Tabel 13. Kajian Telaahan RTRW Provinsi DKI Jakarta Disesuaikan dengan Tupoksi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar Yang digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
			Internal (Kewenangan PD)	Eksternal (Diluar Kewenangan PD)	
Pengembangan RTH untuk mencapai 30% dari luas daratan Provinsi DKI Jakarta (20% RTH Publik dan 10 % RTH Privat) sebagai upaya peningkatan kualitas kehidupan kota	5,1 % dari luas Wilayah Kota	20% RTH dari Luas Wilayah Kota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Gubernur tentang Ruang Terbuka Hijau belum disahkan</li> <li>2. Masterplan RTH belum menjadi rujukan dalam perencanaan pembangunan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingginya nilai tanah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.</li> <li>2. Tingginya tingkat alih fungsi Ruang Terbuka Hijau menjadi Ruang Terbangun</li> <li>3. Kemampuan APBD terbatas dalam mengakomodir pengadaan lahan untuk RTH</li> </ol>	Terhambat dan lambannya pemenuhan kualitas dan kuantitas RTH taman, hutan dan makam

### 3.6 Telaahan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) Indonesia

TPB/ SDGs merupakan kerangka kerja pembangunan yang memiliki tiga dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. TPB/ SDGs diformulasikan ke dalam 17 Goals, 169 Target/Sasaran dan 241 Indikator. Dinas Pertamanan dan Hutan Kota memiliki keterkaitan erat dengan dua tujuan TPB/SDGs yaitu:

a. Tujuan nomor 11 Menjadikan Kota dan Pemukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan

Indikator yang berkaitan dengan tupoksi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota dalam tujuan di atas yakni indikator 11.7.1.(a) Jumlah kota hijau yang menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.

b. Tujuan nomor 15 Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati.

Indikator yang berkaitan dengan tupoksi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota dalam tujuan di atas yakni :

- indikator 15.1.1.(a) proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan
- indikator 15.2.1.(a) luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya
- indikator 15.2.1.(b) luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem
- indikator 15.2.1.(c) jumlah kawasan konservasi yang memperoleh nilai indeks METT minimal 70%
- indikator 15.2.1.(d) jumlah kesatuan pengelolaan hutan
- indikator 15.3.1.(a) proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan
- indikator 15.5.1\* persentase populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas
- indikator 15.7.1.(a) persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi
- indikator 15.7.1.(b) jumlah penambahan spesies satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangkan pada lembaga konservasi
- indikator 15.8.1.(a) rumusan kebijakan dan rekomendasi karantina hewan dan tumbuhan, serta keamanan hayati hewani dan nabati
- indikator 15.9.1.(a) dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati



Gambar 6. Tujuh Belas Goals dalam TPB/SDGs

Dari kedua tujuan TPB/SDGs diatas, yang bisa dijadikan tolak ukur Renstra Dinas Pertamanan dan Hutan Kota dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sampai dengan akhir tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 14. Kajian Telaahan TPB/ SDGs Disesuaikan dengan Tupoksi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota

No	Tujuan TPB/SDGs	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan	Ketersediaan RTH di perkotaan DKI Jakarta belum memenuhi 30% dari luasan wilayah kota	Penambahan luasan RTH terbatas sesuai dengan kemampuan APBD	RTH memiliki peran penting dalam mengatasi permasalahan lingkungan di perkotaan
2.	Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati	Ketersediaan RTH hutan di DKI Jakarta belum memenuhi 10% dari luasan wilayah kota	Penambahan luasan RTH hutan terbatas sesuai dengan kemampuan APBD	RTH hutan memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian dan keseimbangan ekosistem perkotaan termasuk pelestarian keanekaragaman hayati di dalamnya

### 3.7 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan hasil telaahan RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2005-2025, Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020-2024, dan RTRW Provinsi DKI Jakarta 2030, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi isu strategis Dinas Pertamanan dan Hutan Kota sebagai acuan dalam penentuan rencana strategisnya selama tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

#### 1. Peningkatan kuantitas Ruang Terbuka Hijau

Terjaminnya ketersediaan RTH yang memadai dan berkualitas harus menjadi arahan pembangunan DKI Jakarta mengingat permasalahan mendasar kota bermula dari penataan ruang. Peran penting RTH dalam lingkungan kota dapat menjadi solusi terwujudnya lingkungan kota yang sehat. Keterbatasan lahan terbuka, pengelolaan lahan dan kepemilikan lahan di lingkungan perkotaan merupakan masalah terbesar yang dihadapi dalam perencanaan dan penyediaan Ruang Terbuka Hijau di DKI Jakarta, sehingga diperlukan inovasi pemikiran dan perubahan paradigma yang mampu mengoptimalkan ruang kota yang tersedia untuk memenuhi fungsi Ruang Terbuka Hijau. Penambahan kuantitas RTH disini meliputi penambahan luasan dan tutupan lahan untuk RTH taman, makam, jalur hijau dan hutan di Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan kewenangan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota.

#### 2. Peningkatan kualitas Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau yang berkualitas merupakan salah satu bentuk pembangunan berkelanjutan, yang berperan dalam menyeimbangkan kegiatan pembangunan infrastruktur dan kawasan terbangun di perkotaan. Peningkatan kualitas RTH harus terus dilakukan menyesuaikan (adaptif) dengan perkembangan kota yang selalu berubah serta kebutuhan masyarakatnya. Peningkatan kualitas bisa dari peningkatan fungsi RTH selain fungsi ekologis dan estetika, seperti fungsi sosial budaya, fungsi ekonomi dan fungsi mitigasi bencana. Selain itu bisa juga dari pengembangan inovasi terhadap elemen-elemen lanskap perkotaan dan pengembangan jejaring ruang hijau-biru untuk pemerataan sebaran RTH di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta.

#### 3. Peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Dinas Pertamanan dan Hutan Kota memiliki tupoksi memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait pertamanan, kehutanan dan pemakaman. Pelayanan tersebut harus terus ditingkatkan agar tercapai pelayanan yang prima yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Salah satunya dengan pengembangan sistem pelayanan yang mudah, cepat dan terintegrasi.

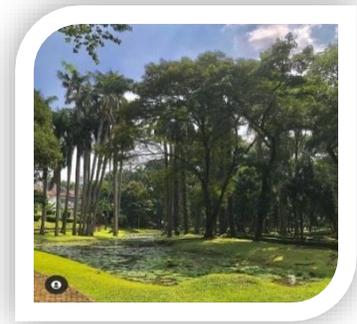


---

Selain itu, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota juga memiliki tupoksi dalam pengembangan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Pengembangan peran serta ini bisa dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan penyuluhan dan pelatihan, masyarakat berperan aktif dalam mengaktivasi taman, memberdayakan Kelompok Tani Hutan, dan lain sebagainya. Upaya pemberdayaan masyarakat ini perlu terus ditingkatkan agar Dinas Pertamanan dan Hutan Kota memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat.

4. Peningkatan produktifitas dan integritas kerja aparatur yang berorientasi pada pelayanan publik

Aparatur Dinas Pertamanan dan Hutan Kota harus terus mengembangkan kemampuan dan kompetensinya dalam rangka memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat.



## BAB 4

# Tujuan dan Sasaran

Visi RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2023-2026 adalah “Ibukota NKRI yang Aman, Nyaman, Sejahtera, Produktif, Berkelanjutan dan Berdaya Saing Global”. Visi RPJPD ini kemudian diturunkan ke level tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026. Adapun salah satu tujuan RPD yang berkaitan dengan tupoksi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota yaitu Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan. Kemudian di tingkat sasaran RPD adalah Tercapainya Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon.

Dengan mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPD di atas, dapat dijabarkan tujuan dan sasaran Dinas Pertamanan dan Hutan Kota untuk tahun 2023-2026, yaitu:

### a. Tujuan

Tujuan Renstra Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Tutupan Lahan Melalui Perluasan Ruang Terbuka Hijau Hutan Kota
2. Penyediaan Ruang Terbuka dan Infrastruktur Hijau yang Inklusif dan Berkualitas

### b. Sasaran

Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan seperti di atas, maka sasaran Renstra Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta dijabarkan sebagai berikut:

- **Sasaran 1 :**  
Peningkatan Kualitas Lahan dan Hutan
- **Sasaran 2 :**  
Peningkatan Kualitas Sebaran Ruang Terbuka Hijau

Selanjutnya akan ditentukan target dari setiap indikator tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pertamanan dan Hutan Kota tahun 2023-2026.



Tabel 15. Target Tujuan Tahun 2023-2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi Akhir
						2023	2024	2025	2026	
1	Peningkatan Tutupan Lahan Melalui Perluasan Ruang Terbuka Hijau Hutan Kota	Indeks Kualitas Lahan	Indeks Kualitas Lahan adalah Nilai yang menggambarkan kualitas lahan dalam suatu wilayah pada waktu tertentu berdasarkan luas tutupan lahan  Rumus perhitungan: $IKL = 100 - [(84,3 - (ITL \times 100)) \times \frac{50}{54,3}]$  Sumber Data: Pengukuran Mandiri	Nilai	26,25	26,75	27,25	27,75	28,25	28,25
2	Penyediaan Ruang Terbuka dan Infrastruktur Hijau yang Inklusif dan Berkualitas	Persentase Ruang Terbuka Hijau	Ruang Terbuka Hijau adalah RTH Taman, Makam, Jalur Hijau dan Hutan. Ditargetkan dilakukan penambahan RTH setiap tahunnya seluas 6 Ha (0,009%) dari hasil pengadaan lahan dan serah terima fasos fasum.  Rumus perhitungan = luas total RTH di tahun (n) dibagi luas daratan DKI Jakarta dikali 100%  Luas Daratan DKI Jakarta 66.150 Ha atau 661,5 km <sup>2</sup>  Sumber Data : Pengukuran Mandiri	%	5,176%	5,185%	5,194%	5,203%	5,212%	5,212%

Tabel 16. Target Sasaran Tahun 2023-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi Akhir
							2023	2024	2025	2026	
1	Peningkatan Tutupan Lahan Melalui Perluasan Ruang Terbuka Hijau Hutan Kota	Peningkatan Kualitas Lahan dan Hutan	Persentase Penambahan Luas dan Kualitas Lahan Ruang Terbuka Hijau Hutan	<p>Persentase luas hutan dibawah pengelolaan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota yang telah dilakukan pembangunan/penataan/penghijauan dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas hutan. Adapun keseluruhan luas lahan hutan yang dikelola oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota adalah 299,72 Ha.</p> <p>Rumus perhitungan : Luas pembangunan/penataan/penghijauan hutan dibagi Luas hutan yang dikelola Dinas Pertamanan dan Hutan Kota dikali 100%</p> <p>Sumber Data : Pengukuran Mandiri</p>	%	73,91%	75,58%	76,91%	78,25%	79,58%	79,58%

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi Akhir
							2023	2024	2025	2026	
2	Penyediaan Ruang Terbuka dan Infrastruktur Hijau yang Inklusif dan Berkualitas	Peningkatan Kualitas Sebaran Ruang Terbuka Hijau	Persentase Wilayah Kelurahan dengan Infrastruktur Hijau-Biru Terintegrasi	<p>Infrastruktur hijau-biru terintegrasi adalah penyediaan sumur resapan/bioswale/kolam retensi/rain garden/embung pada lahan ruang terbuka hijau yang dikelola oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota.</p> <p>Rumus perhitungan = jumlah kelurahan yang memiliki infrastruktur hijau-biru dibagi jumlah total kelurahan di 5 wilayah DKI Jakarta (262 kelurahan) dikali 100%.</p>	%	25%	27%	30%	34%	38%	38%



## BAB 5

### Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, dibutuhkan strategi dan arah kebijakan yang merupakan kerangka kerja dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Dinas Pertamanan dan Hutan Kota. Adapaun strategi dan arah kebijakan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota adalah sebagai berikut:

Tabel 17. Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2023-2026

<i>Visi RPJPD : Ibukota NKRI yang Aman, Nyaman, Sejahtera, Produktif, Berkelanjutan dan Berdaya Saing Global</i>			
Tujuan RPD : Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan			
Sasaran RPD : Tercapainya Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Peningkatan Tutupan Lahan Melalui Perluasan Ruang Terbuka Hijau Hutan Kota	Peningkatan Kualitas Lahan dan Hutan	Mendorong peningkatan rehabilitasi lahan dan pemanfaatan sumber daya hutan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Terjaganya keberadaan, fungsi dan manfaat hutan yang berkelanjutan
Penyediaan Ruang Terbuka dan Infrastruktur Hijau yang Inklusif dan Berkualitas	Peningkatan Kualitas Sebaran Ruang Terbuka Hijau	Mendorong Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Ruang Terbuka Hijau yang adaptif	Optimalisasi Sebaran RTH Hutan, Taman dan Makam melalui penambahan luasan, pembangunan dan penataan Ruang Terbuka Hijau



## **BAB 6**

# **Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan**

Pada bab ini dijelaskan mengenai rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota beserta pendanaan indikatif dengan mempedomani aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan ini nantinya dijadikan acuan dalam penyusunan rencana kerja Dinas Pertamanan dan Hutan Kota selama tahun 2023-2026.

Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut juga selaras dengan pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah (KSD), dimana KSD utama yang diampu oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota adalah KSD Pembangunan Taman Maju Bersama dan Ruang Terbuka Hijau. Selain itu Dinas Pertamanan dan Hutan Kota juga turut mendukung pelaksanaan KSD lainnya seperti KSD Pengendalian Pencemaran Udara, Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian, Penguatan Peran Walikota/Bupati



dalam Penataan Kawasan, Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/Situ/Embung, Revitalisasi Polder dan Tanggul Pantai serta beberapa KSD lainnya terkait dengan pengelolaan RTH maupun peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui RTH dan tanaman.

Adapun program prioritas yang mendukung pelaksanaan KSD antara lain Program Pengelolaan Hutan (urusan kehutanan) dan Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (urusan lingkungan hidup). Pada Program Pengelolaan Hutan, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung KSD 44 terkait peningkatan kuantitas dan kualitas hutan seperti pembangunan hutan, penataan hutan, pemeliharaan hutan dan penambahan luas RTH hutan. Sementara pada Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati), kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung KSD 44 terkait pengelolaan Ruang Terbuka Hijau lainnya seperti RTH taman, jalur hijau, kebun bibit, makam, serta Taman Margasatwa Ragunan dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas RTH seperti pembangunan, penataan, pemeliharaan dan penambahan luas RTH.

Penjabaran dari rencana program, kegiatan dan sub kegiatan beserta pendanaannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 18. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023-2026

PERANGKAT DAERAH : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.3	TERCAPAINYA PEMULIHAN EKOSISTEM KOTA DAN IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN RENDAH KARBON															
1	PENYEDIAAN RUANG TERBUKA DAN INFRASTRUKTUR HIJAU YANG INKLUSIF DAN BERKUALITAS	PERSENTASE RUANG TERBUKA HIJAU	Persen	5,176	5,185	1.639.721.84 0.991	5,194	1.841.481.70 0.862	5,203	1.962.615.45 4.156	5,212	2.096.785.81 0.354	5,212	7.540.604.80 6.363		
1.1	PENINGKATAN KUALITAS SEBARAN RUANG TERBUKA HIJAU	PERSENTASE WILAYAH KELURAHAN DENGAN INFRASTRUKTUR HIJAU - BIRU TERINTEGRASI	Persen	25	27	1.639.721.84 0.991	30	1.841.481.70 0.862	34	1.962.615.45 4.156	38	2.096.785.81 0.354	38	7.540.604.80 6.363		
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase jumlah ruang terbuka hijau yang dikelola sesuai dengan Rencana Induk Ruang Terbuka Hijau	Persen	100	100	1.639.721.84 0.991	100	1.841.481.70 0.862	100	1.962.615.45 4.156	100	2.096.785.81 0.354	100	7.540.604.80 6.363	BIDANG PERTAMANAN	DKI JAKARTA
															BIDANG JALUR HIJAU	
															BIDANG PEMAKAMAN	
															UNIT PENGELOLA PENGEMBANGAN TANAMAN PERKOTAAN	
															UNIT PENGADAAN TANAH PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	
															PUSAT DATA DAN INFORMASI PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	
															SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKPUS	
															SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKUT	
															SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKBAR	
															SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKSEL	
															SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKTIM	
2.11.04.1.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Persentase jumlah ruang terbuka hijau yang terpelihara dan terpenuhi kebutuhan sarana prasarananya	Persen	100	100	1.639.721.84 0.991	100	1.841.481.70 0.862	100	1.962.615.45 4.156	100	2.096.785.81 0.354	100	7.540.604.80 6.363	BIDANG PERTAMANAN	DKI JAKARTA
															BIDANG JALUR HIJAU	
															BIDANG KEHUTANAN	

PERANGKAT DAERAH : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															BIDANG PEMAKAMAN	
															UNIT PENGELOLA PENGEMBANGAN TANAMAN PERKOTAAN	
															UNIT PENGADAAN TANAH PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	
															PUSAT DATA DAN INFORMASI PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	
															SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKPUS	
															SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKUT	
															SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKBAR	
															SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKSEL	
															SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKTIM	
2.11.04.1.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	Ha	1409	1409	1.556.299.86 4.267	1421	1.690.153.61 3.163	1433	1.824.168.27 8.152	1445	1.974.394.38 4.124	1445	7.045.016.13 9.706	BIDANG PERTAMANAN	DKI JAKARTA
															BIDANG JALUR HIJAU	
															UNIT PENGELOLA PENGEMBANGAN TANAMAN PERKOTAAN	
															UNIT PENGADAAN TANAH PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	
															PUSAT DATA DAN INFORMASI PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	
															SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKPUS	
															SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKUT	

PERANGKAT DAERAH : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKBAR	
															SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKSEL	
															SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKTIM	
2.11.04.1.01.05	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Luas taman KEHATI lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	Ha	147	147	83.421.976.7 24	147	151.328.087. 699	147	138.447.176. 004	147	122.391.426. 230	147	495.588.666. 657	UNIT PENGELOLA TAMAN MARGASATWA RAGUNAN	DKI JAKARTA
1	PENINGKATAN TUTUPAN LAHAN MELALUI PERLUASAN RUANG TERBUKA HIJAU HUTAN KOTA	INDEKS KUALITAS LAHAN	Nilai	26,25	26,75	392.401.136. 440	27,25	382.358.189. 319	27,75	377.331.194. 972	28,25	378.270.411. 757	28,25	1.530.360.93 2.488		
1.1	PENINGKATAN KUALITAS LAHAN DAN HUTAN	PERSENTASE PENAMBAHAN LUAS DAN KUALITAS LAHAN RUANG TERBUKA HIJAU HUTAN	Persentase	73,91	75,58	392.401.136. 440	76,91	382.358.189. 319	78,25	377.331.194. 972	79,58	378.270.411. 757	79,58	1.530.360.93 2.488		
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	0	3	345.762.503. 599	3	332.850.086. 879	3	325.209.252. 129	3	322.184.563. 856	3	1.326.006.40 6.463	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
															UNIT PENGELOLA TAMAN MARGASATWA RAGUNAN	
															UNIT PENGELOLA PENGEMBANGAN TANAMAN PERKOTAAN	
															SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKPUS	
															SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKUT	
															SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKBAR	
															SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKSEL	
															SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKTIM	

PERANGKAT DAERAH : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	Persen	0	100	0	100	200.000.000	100	0	100	200.000.000	100	400.000.000	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
3.28.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	0	0	0	1	200.000.000	0	0	1	200.000.000	2	400.000.000	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	Indeks	0	3	213.547.136.000	3	202.547.136.000	3	192.547.136.000	3	182.547.136.000	3	791.188.544.000	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
		Nilai Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan	Nilai	0	3		3		3		3		3		SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
															UNIT PENGELOLA TAMAN MARGASATWA RAGUNAN	
															UNIT PENGELOLA PENGEMBANGAN TANAMAN PERKOTAAN	
															SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKPUS	
															SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKUT	
															SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKBAR	
															SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKSEL	
															SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKTIM	
															SEKRETARIAT	
															UNIT PENGELOLA TAMAN MARGASATWA RAGUNAN	
															UNIT PENGELOLA PENGEMBANGAN TANAMAN PERKOTAAN	
															SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKPUS	
															SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKUT	

PERANGKAT DAERAH : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Persentase Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan Tepat Waktu	Persen	0	95		95		95		95		95		SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKBAR SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKSEL SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKTIM SEKRETARIAT UNIT PENGELOLA TAMAN MARGASATWA RAGUNAN UNIT PENGELOLA PENGEMBANGAN TANAMAN PERKOTAAN SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKPUS SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKUT SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKBAR SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKSEL SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKTIM	
3.28.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	569	569	213.547.136. 000	538	202.547.136. 000	510	192.547.136. 000	478	182.547.136. 000	478	791.188.544. 000	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks	0	3	200.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000	3	800.000.000	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
3.28.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0	5	200.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000	5	800.000.000	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	Indeks	0	3	40.980.811.1 82	3	43.382.556.8 69	3	46.182.755.6 77	3	48.858.939.8 74	3	179.405.063. 602	SEKRETARIAT  UNIT PENGELOLA TAMAN MARGASATWA RAGUNAN	DKI JAKARTA

PERANGKAT DAERAH : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)

																	UNIT PENGELOLA PENGEMBANGAN TANAMAN PERKOTAAN
																	SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKPUS
																	SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKUT
																	SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKBAR
																	SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKSEL
																	SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKTIM
																	SEKRETARIAT
																	UNIT PENGELOLA TAMAN MARGASATWA RAGUNAN
																	UNIT PENGELOLA PENGEMBANGAN TANAMAN PERKOTAAN
																	SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKPUS
																	SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKUT
																	SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKBAR
																	SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKSEL
		Persentase Pengadministrasian Umum yang Selesai Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan	Persen	0	95		95		95		95		95				

PERANGKAT DAERAH : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKTIM	
3.28.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	0	23	3.122.612.98 8	21	2.958.743.09 4	22	3.204.919.83 5	21	3.184.324.67 6	21	12.470.600.5 93	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
															UNIT PENGELOLA PENGEMBANGAN TANAMAN PERKOTAAN	
															SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKPUS	
															SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKUT	
															SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKBAR	
															SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKSEL	
															SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKTIM	
3.28.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	0	7	637.691.533	7	662.214.689	7	688.807.666	7	717.684.147	7	2.706.398.03 5	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
															UNIT PENGELOLA PENGEMBANGAN TANAMAN PERKOTAAN	
															SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKPUS	
															SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKUT	
															SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKBAR	
															SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKSEL	
															SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKTIM	

PERANGKAT DAERAH : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.28.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	0	8	440.000.000	8	460.000.000	8	480.000.000	8	500.000.000	8	1.880.000.000	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
															UNIT PENGELOLA TAMAN MARGASATWA RAGUNAN	
															UNIT PENGELOLA PENGEMBANGAN TANAMAN PERKOTAAN	
															SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKPUS	
															SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKUT	
															SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKBAR	
															SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKSEL	
															SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKTIM	
3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	0	7	248.037.685	7	265.896.078	7	285.103.531	7	305.801.660	7	1.104.838.954	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
															UNIT PENGELOLA PENGEMBANGAN TANAMAN PERKOTAAN	
															SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKPUS	
															SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKUT	
															SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKBAR	
															SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKSEL	
															SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKTIM	

PERANGKAT DAERAH : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.28.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	0	16	34.135.824.324	16	36.492.575.446	16	38.819.691.916	16	41.322.124.842	16	150.770.216.528	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
															UNIT PENGELOLA TAMAN MARGASATWA RAGUNAN	
															UNIT PENGELOLA PENGEMBANGAN TANAMAN PERKOTAAN	
															SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKPUS	
															SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKUT	
															SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKBAR	
															SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKSEL	
															SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKTIM	
3.28.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	0	7	764.964.076	7	794.869.706	7	827.752.882	7	863.920.618	7	3.251.507.282	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
															UNIT PENGELOLA PENGEMBANGAN TANAMAN PERKOTAAN	
															SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKPUS	
															SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKUT	
															SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKBAR	
															SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKSEL	
															SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKTIM	

PERANGKAT DAERAH : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	8	764.964.076	8	794.869.706	8	827.752.882	8	863.920.618	8	3.251.507.282	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
															UNIT PENGELOLA TAMAN MARGASATWA RAGUNAN	
															UNIT PENGELOLA PENGEMBANGAN TANAMAN PERKOTAAN	
															SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKPUS	
															SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKUT	
															SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKBAR	
															SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKSEL	
															SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKTIM	
3.28.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	0	8	866.716.500	8	953.388.150	8	1.048.726.965	8	1.101.163.313	8	3.969.994.928	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
															UNIT PENGELOLA TAMAN MARGASATWA RAGUNAN	
															UNIT PENGELOLA PENGEMBANGAN TANAMAN PERKOTAAN	
															SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKPUS	
															SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKUT	
															SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKBAR	

PERANGKAT DAERAH : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKSEL	
															SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKTIM	
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Panganggaran yang Efisien	Indeks	0	3	31.209.483.6 48	3	21.964.216.1 76	3	16.812.037.3 01	3	10.838.906.5 31	3	80.824.643.6 56	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
															UNIT PENGELOLA TAMAN MARGASATWA RAGUNAN	
															UNIT PENGELOLA PENGEMBANGAN TANAMAN PERKOTAAN	
															SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKPUS	
															SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKUT	
															SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKBAR	
															SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKSEL	
															SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKTIM	
3.28.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	538	62	16.925.893.2 92	48	11.738.691.3 06	39	9.491.309.08 1	15	7.438.906.53 1	164	45.594.800.2 10	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
															UNIT PENGELOLA PENGEMBANGAN TANAMAN PERKOTAAN	
															SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKPUS	
															SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKUT	

PERANGKAT DAERAH : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKBAR	
															SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKSEL	
															SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKTIM	
3.28.01.1.07.03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit	191	31	13.273.205.6 20	18	9.804.309.17 0	14	6.920.728.22 0	5	3.000.000.00 0	68	32.998.243.0 10	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
															UNIT PENGELOLA PENGEMBANGAN TANAMAN PERKOTAAN	
															UNIT PENGELOLA TAMAN MARGASATWA RAGUNAN	
															SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKTIM	
															SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKSEL	
3.28.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	4	998.871.586	2	400.000.000	2	400.000.000	2	400.000.000	2	2.198.871.58 6	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
															UNIT PENGELOLA PENGEMBANGAN TANAMAN PERKOTAAN	
															SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKPUS	
															SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKTIM	
3.28.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	7	2	11.513.150	1	21.215.700	0	0	0	0	3	32.728.850	UNIT PENGELOLA PENGEMBANGAN TANAMAN PERKOTAAN	DKI JAKARTA
															SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKPUS	
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	0	3	35.498.702.6 58	3	37.096.805.5 66	3	38.804.914.6 64	3	40.633.419.4 70	3	152.033.842. 358	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA

PERANGKAT DAERAH : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															UNIT PENGELOLA TAMAN MARGASATWA RAGUNAN	
															UNIT PENGELOLA PENGEMBANGAN TANAMAN PERKOTAAN	
															PUSAT DATA DAN INFORMASI PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	
															SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKPUS	
															SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKUT	
															SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKBAR	
															SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKSEL	
															SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKTIM	
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	0	8	19.253.421.0 04	8	19.596.923.8 38	8	19.965.241.1 67	8	20.360.388.1 30	8	79.175.974.1 39	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
															UNIT PENGELOLA TAMAN MARGASATWA RAGUNAN	
															UNIT PENGELOLA PENGEMBANGAN TANAMAN PERKOTAAN	
															SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKUT	
															SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKBAR	
															SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKSEL	

PERANGKAT DAERAH : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.28.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	0	7	570.030.320	7	589.962.795	7	611.713.953	7	635.461.923	7	2.407.168.991	SEKRETARIAT UNIT PENGELOLA PENGEMBANGAN TANAMAN PERKOTAAN SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKPUS SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKUT SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKBAR SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKSEL SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKTIM	DKI JAKARTA
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	0	8	15.675.251,334	8	16.909.918,933	8	18.227.959,544	8	19.637.569,417	8	70.450.699,228	SEKRETARIAT PUSAT DATA DAN INFORMASI PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA UNIT PENGELOLA TAMAN MARGASATWA RAGUNAN SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKPUS SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKUT SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKBAR SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKSEL	DKI JAKARTA

PERANGKAT DAERAH : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	0	3	14.326.370.11	3	15.459.372.268	3	16.662.408.487	3	17.906.161.981	3	64.354.312.847	SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKTIM	DKI JAKARTA
															SEKRETARIAT	
															UNIT PENGELOLA TAMAN MARGASATWA RAGUNAN	
															UNIT PENGELOLA PENGEMBANGAN TANAMAN PERKOTAAN	
															SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKPUS	
															SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKUT	
															SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKBAR	
															SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKSEL	
															SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKTIM	
3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1729	1663	13.211.572.206	1705	14.307.548.644	1731	15.470.734.217	1768	16.671.348.276	1768	59.661.203.343	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
															UNIT PENGELOLA TAMAN MARGASATWA RAGUNAN	
															UNIT PENGELOLA PENGEMBANGAN TANAMAN PERKOTAAN	
															SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKPUS	
															SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKUT	

PERANGKAT DAERAH : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKBAR	
															SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKSEL	
															SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKTIM	
3.28.01.1.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	15	15	571.595.508	15	590.175.283	18	609.197.402	18	629.657.272	18	2.400.625.46 5	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
															SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKUT	
															UNIT PENGELOLA PENGEMBANGAN TANAMAN PERKOTAAN	
3.28.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	347	271	543.202.397	271	561.648.341	271	582.476.868	271	605.156.433	271	2.292.484.03 9	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
															SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKPUS	
															UNIT PENGELOLA PENGEMBANGAN TANAMAN PERKOTAAN	
															SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKUT	
															SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKTIM	
3.28.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Indeks Kepuasan Layanan BLUD	Indeks	0	3	10.000.000.0 00	3	12.000.000.0 00	3	14.000.000.0 00	3	21.000.000.0 00	3	57.000.000.0 00	UNIT PENGELOLA TAMAN MARGASATWA RAGUNAN	DKI JAKARTA
3.28.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1	10.000.000.0 00	1	12.000.000.0 00	1	14.000.000.0 00	1	21.000.000.0 00	1	57.000.000.0 00	UNIT PENGELOLA TAMAN MARGASATWA RAGUNAN	DKI JAKARTA
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas hutan yang dikelola	Persen	100	100	44.259.610.6 96	100	46.962.995.6 78	100	49.399.390.0 22	100	53.173.054.1 43	100	193.795.050. 539	BIDANG KEHUTANAN	DKI JAKARTA

PERANGKAT DAERAH : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKUT SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKBAR SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKSEL SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKTIM SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKPUS	
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Jumlah lokasi hutan kota yang direhabilitasi	Lokasi	9	7	43.639.610.696	8	46.322.995.678	9	48.757.390.022	10	52.530.854.143	34	191.250.850.539	SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKUT SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKBAR SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKSEL SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKTIM BIDANG KEHUTANAN	DKI JAKARTA
3.28.03.1.04.03	Pembangunan Hutan Kota di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Kota yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	35,05	4	43.413.697.696	3	46.051.903.678	3	48.418.525.022	3	52.079.034.143	13	189.963.160.539	BIDANG KEHUTANAN SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKUT SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKTIM SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKSEL SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKBAR	DKI JAKARTA
3.28.03.1.04.06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Jumlah Benih yang dikembangkan untuk Rehabilitasi Lahan	Benih	0	22000	225.913.000	22000	271.092.000	22000	338.865.000	22000	451.820.000	88000	1.287.690.000	BIDANG KEHUTANAN	DKI JAKARTA

PERANGKAT DAERAH : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas hutan lindung dan hutan produksi yang dikelola	Ha	202,86	202,86	620.000.000	202,86	640.000.000	202,86	642.000.000	202,86	642.200.000	202,86	2.544.200.000	BIDANG KEHUTANAN	DKI JAKARTA
3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Ha	202,86	202,86	200.000.000	202,86	220.000.000	202,86	222.000.000	202,86	222.200.000	202,86	864.200.000	BIDANG KEHUTANAN	DKI JAKARTA
3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen	0	12	420.000.000	12	420.000.000	12	420.000.000	12	420.000.000	48	1.680.000.000	BIDANG KEHUTANAN	DKI JAKARTA
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase penyelesaian laporan masyarakat terkait konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya	Persen	0	90	360.000.000	90	396.000.000	90	435.600.000	90	479.160.000	90	1.670.760.000	BIDANG KEHUTANAN	DKI JAKARTA
3.28.04.1.02	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix ) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar	Kegiatan	12	12	360.000.000	12	396.000.000	12	435.600.000	12	479.160.000	12	1.670.760.000	BIDANG KEHUTANAN	DKI JAKARTA
3.28.04.1.02.01	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Laporan	0	12	360.000.000	12	396.000.000	12	435.600.000	12	479.160.000	12	1.670.760.000	BIDANG KEHUTANAN	DKI JAKARTA
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase peserta dengan tingkat pemahaman baik pada pendidikan, pelatihan dan pemberdayaan bidang kehutanan	Persen	0	80	1.519.022.145	80	1.649.106.762	80	1.786.952.821	80	1.933.633.758	80	6.888.715.486	BIDANG KEHUTANAN	DKI JAKARTA
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Indeks kepuasan pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	Indeks	0	3	1.519.022.145	3	1.649.106.762	3	1.786.952.821	3	1.933.633.758	3	6.888.715.486	BIDANG KEHUTANAN	DKI JAKARTA
3.28.05.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang	0	335	1.369.022.145	335	1.484.106.762	335	1.605.452.821	335	1.733.983.758	1340	6.192.565.486	BIDANG KEHUTANAN	DKI JAKARTA
															SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKUT	
															SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKTIM	
															SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKUT	

PERANGKAT DAERAH : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA - JAKTIM	
3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	14	16	150.000.000	18	165.000.000	20	181.500.000	22	199.650.000	22	696.150.000	BIDANG KEHUTANAN	DKI JAKARTA
3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Jumlah DAS di Provinsi DKI Jakarta yang telah dikelola sesuai standar	Lokasi	0	1	500.000.000	2	500.000.000	3	500.000.000	4	500.000.000	4	2.000.000.000	BIDANG KEHUTANAN	DKI JAKARTA
3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengelolaan DAS	Kegiatan	0	3	500.000.000	3	500.000.000	3	500.000.000	3	500.000.000	3	2.000.000.000	BIDANG KEHUTANAN	DKI JAKARTA
3.28.06.1.01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan DAS yang Ditetapkan	Dokumen	0	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	4	600.000.000	BIDANG KEHUTANAN	DKI JAKARTA
3.28.06.1.01.02	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	Dokumen	0	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	600.000.000	BIDANG KEHUTANAN	DKI JAKARTA
3.28.06.1.01.05	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	Lembaga	0	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	4	800.000.000	BIDANG KEHUTANAN	DKI JAKARTA



## BAB 7

### Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan. Indikator kinerja Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta tahun 2023-2026 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Provinsi DKI Jakarta 2023-2026. Target Kinerja Dinas Pertamanan dan Hutan Kota yang juga merupakan Indikator Kinerja Utama dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 19. Target Kinerja (Indikator Kinerja Utama) Tahun 2023-2026

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Periode RPD	Target Kinerja				Kondisi Akhir Periode RPD
			2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Kualitas Lahan	Nilai 26,25	Nilai 26,75	Nilai 27,25	Nilai 27,75	Nilai 28,25	Nilai 28,25
2	Persentase Penambahan Luas dan Kualitas Lahan Ruang Terbuka Hijau Hutan	73,91%	75,58%	76,91%	78,25%	79,58%	79,58%
3	Persentase Ruang Terbuka Hijau	5,176%	5,185%	5,194%	5,203%	5,212%	5,212%
4	Persentase Wilayah Kelurahan dengan Infrastruktur Hijau-Biru Terintegrasi	25%	27%	30%	34%	38%	38%



## BAB 8

### Penutup

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Pertamanan dan Hutan Kota periode 2023-2026 merupakan penjabaran tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta yang tertuang di dalam RPD Provinsi DKI Jakarta 2023-2026. Renstra Dinas Pertamanan dan Hutan Kota ini merupakan sebuah dokumen yang wajib dijadikan sebagai acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota pada periode tersebut.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) periode 2023-2026 ini memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, rencana kerja program, kegiatan dan sub kegiatan serta indikator kinerja Dinas Pertamanan dan Hutan Kota yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta itu sendiri, dimana didalamnya sudah ditetapkan indikator dan target kinerja per tahunnya selama 4 (empat) tahun kedepan.

Renstra Dinas Pertamanan dan Hutan Kota ini dalam pelaksanaannya harus selalu dilakukan monitoring, pengawasan dan evaluasi. Hal ini dilakukan sebagai pengejawantahan tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel dan sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota dalam menjalankan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Pada akhirnya, semoga Allah SWT memberikan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga apa yang tercantum dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah yang diembankan kepada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan membawa kebaikan untuk warga Jakarta yang kita cintai.

Jakarta, Maret 2022  
Kepala Dinas Pertamanan  
Dan Hutan Kota  
Provinsi DKI Jakarta



Ir. Suzi Marsitawati, S.Sos., M.Si  
NIP. 196211061989102001